

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN
DAN PERLINDUNGAN GEOPARK MERANGIN JAMBI**

Tesis

Oleh

**TONI ROMA DONA
NPM. 2326021002**



**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN GEOPARK MERANGIN JAMBI

Oleh

Toni Roma Dona

Penelitian ini mengkaji benturan kepentingan antara aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan upaya pengembangan destinasi wisata di kawasan Geopark Merangin yang berdampak pada fungsi konservasi. Meskipun pengembangan wisata berkelanjutan merupakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Geopark, implementasinya menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara fungsi konservasi dan fungsi ekonomi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan pendekatan *Collaborative Governance* dalam pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan serta menganalisis dampaknya terhadap keberlanjutan kawasan Geopark Merangin. Pendekatan *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash serta pendekatan pembangunan berkelanjutan dari Kates et al. digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada 10 informan kunci, serta observasi dan dokumentasi sebagai data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi di Geopark Merangin berhasil dalam menerapkan tata kelola kolaborasi yang baik, walaupun belum sepenuhnya optimal. Keberhasilan terlihat pada dimensi 1). Kondisi awal dan 2). Kepemimpinan fasilitatif, yang mampu membangun kepercayaan dan komunikasi antarpihak. Dimensi 3). Desain kelembagaan, menunjukkan beberapa kelemahan karena, a. Belum ideal dari segi struktur kelembagaan dan pendanaan, b. Kelembagaan ini masih didominasi oleh unsur pemerintah, c. Belum didukung regulasi yang kuat untuk mendukung upaya perlindungan kawasan, khususnya dalam menghadapi aktivitas PETI. 4). Proses kolaboratif, menunjukkan keberhasilan dalam membangun komitmen bersama dan mendorong program-program pengelolaan bersama dalam aspek a. Pemberdayaan Masyarakat, b. Riset dan Penelitian, c. Konservasi kawasan, dan d. Pengembangan wisata berkelanjutan. Dari sisi dampak, kolaborasi memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan kawasan. Dimensi 1). Alam, menunjukkan upaya yang konservasi yang baik, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pengendalian penambangan emas tanpa izin dan konflik kepentingan antara fungsi konservasi dan ekonomi. Sementara itu, dimensi 2). Penunjang kehidupan, dan dimensi 3). Masyarakat, menunjukkan adanya pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, peningkatan jumlah wisatawan, serta penguatan kapasitas dan ekonomi masyarakat lokal.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Geopark Merangin, Pembangunan Berkelanjutan, Destinasi Wisata.

ABSTRACT

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE MANAGEMENT AND PROTECTION OF MERANGIN JAMBI GEOPARK

By

Toni Roma Dona

This study examines the conflict of interest between illegal gold mining activities (PETI) and the development of tourism destinations in the Merangin Geopark area, which has implications for its conservation function. Although the development of sustainable tourism is mandated by Presidential Regulation No. 9 of 2019 on Geopark Development, its implementation faces challenges in balancing conservation objectives with economic functions. The study aims to describe the application of the Collaborative Governance approach in developing sustainable tourism destinations and to analyze its impact on the sustainability of the Merangin Geopark area. The Collaborative Governance model by Ansell and Gash, along with the sustainable development framework by Kates et al., is employed to address the research problem. This qualitative research utilizes in-depth interviews with 10 key informants, supported by observation and document analysis as secondary data sources. The findings reveal that collaboration in Merangin Geopark has been successfully implemented in establishing sound collaborative governance, although not yet fully optimal. Success is observed in two key dimensions: (1) starting conditions and (2) facilitative leadership, both of which foster trust and communication among stakeholders. However, the (3) institutional design dimension shows several weaknesses: (a) suboptimal institutional structure and funding, (b) government dominance, and (c) the absence of strong regulatory support, particularly in addressing illegal mining. The (4) collaborative process dimension demonstrates success in building shared commitments and promoting joint management programs in the areas of (a) community empowerment, (b) research and development, (c) environmental conservation, and (d) sustainable tourism development. In terms of impact, collaboration contributes positively to regional sustainability. The (1) environmental dimension reflects strong conservation efforts, despite challenges related to illegal mining and conflicting conservation-economic interests. The (2) life support system and (3) community dimensions show sustainable resource utilization, increased tourism visits, and strengthened local capacity and economy.

Keywords: Collaborative Governance, Merangin Geopark, Sustainable Development, Tourism Destination.

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN
DAN PERLINDUNGAN GEOPARK MERANGIN JAMBI**

Oleh

**TONI ROMA DONA
NPM. 2326021002**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik**



**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN GEOPARK MERANGIN JAMBI**

Nama Mahasiswa : **Toni Roma Dona**

NPM : **2326021002**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

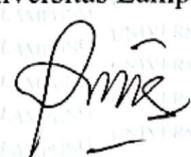
MENYUTUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.
NIP. 197804302008121001


Dr. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP. 196405081993031004

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**


Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 196902191994032001

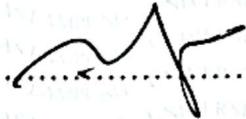
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P



Sekretaris : Dr. Pitojo Budiono, M.Si.



Penguji Utama : Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.
NIP. 197608212000032001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 11 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

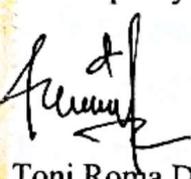
1. Tesis dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Geopark Merangin Jambi” adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,




Toni Roma Dona
NPM. 2326021002

RIWAYAT HIDUP



Toni Roma Dona lahir di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati pada 21 Desember 2000. Anak ketiga dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan Ayahanda “**Umbar**” dan Ibunda “**Parmi**”. Penulis berasal dari keluarga petani yang sejak awal tahun 1990-an memutuskan untuk merantau dan menetap di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 124 Desa Koto Baru

dari tahun 2006 hingga lulus pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 10 Merangin dan menyelesaikannya pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 13 Merangin dari tahun 2015 hingga 2018.

Setelah lulus, penulis diterima di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui jalur SPAN-PTKIN. Pendidikan jenjang S1 dilalui dari tahun 2018 hingga dinyatakan lulus pada wisuda Desember 2022. Selama masa studi S1, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan, khususnya di bidang kepramukaan. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Racana Pramuka di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan mewakili kampus dalam ajang nasional Perkemahan Wirakarya Nasional (PWN) PTKIN tahun 2021 di UIN Raden Fattah Palembang. Pengalaman kepramukaan tersebut mengantarkannya menjadi pemateri dalam kegiatan sosialisasi energi terbarukan yang diselenggarakan oleh APROBI pada PWN Jambi tahun 2021. Penulis juga merupakan penerima Beasiswa Bank Indonesia tahun 2021 dan aktif dalam organisasi Generasi Baru Indonesia (GenBI), baik di tingkat universitas maupun provinsi.

Sebelum melanjutkan studi ke jenjang magister, penulis memiliki pengalaman karir antara lain sebagai Staf Bidang Perencanaan dan Evaluasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, Pendamping PPH di Halal Center UIN Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi, serta sebagai tenaga pendata *Freelance* di BPS Kabupaten Batang Hari dan BPS Kabupaten Merangin. Selain itu, penulis juga mengembangkan usaha peternakan kambing yang masih berjalan hingga saat ini. Pada tahun 2023, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

MOTTO

“Kehidupan yang bermakna adalah ketika pengetahuan digunakan tidak hanya untuk memahami dunia, tetapi juga untuk menjaga alam dan memberi manfaat untuk sesama”.

“Ilmu adalah cahaya yang Allah tanamkan di hati hamba-Nya, dan dengan itu ia melihat kebenaran”.

-Imam Ibnul Qayyim.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

(QS. Al-Qashash: 77)

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

(QS. Al-'Alaq: 5)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan tesis ini kepada:

Kedua orang tuaku tersayang Ibunda Parmi dan Ayahanda Umbar.

*Orang yang paling menyayangiku dengan penuh cinta dan kasih,
doa serta dukungannya tiada henti dengan penuh ketulusan.*

*Ketika semua tampak tidak memungkinkan, kalian maju dan
mendorongku untuk terus melangkah tanpa ragu. Peluh kasih yang
kalian berikan, tiada hal yang sebanding untuk membalasnya.*

*Karya ini merupakan bagian penting dari bukti setiap doa dan
dukungan yang ayah dan ibu berikan. Maka izinkanlah anakmu ini
untuk mempersembahkan karya ini kepada Ayah dan Ibu.*

*Terimakasih telah memberikan segalanya untuk mendukung
anakmu ini Ayah dan Ibu. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai salah
satu bentuk baktiku kepada orang tuaku. Sebagai bentuk ikhtiar
mengangkat derajat kedua orang tuaku.*

*Karya ini turut kupersembahkan kepada kedua kakak ku tercinta,
Jumiati dan Muhammad Effendi. Serta adikku tersayang, Bambang*

Purnomo. Berkat dukungan kalian karya ini bisa terselesaikan.

*Serta untuk Alamamaterku tercinta, Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Lampung. Semoga semakin maju, unggul dan terdepan
dalam mencetak generasi-generasi hebat dan berkualitas.*

SANWACANA



Alhamdulillah atas berkat Rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan naskah tesis dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Geopark Merangin Jambi” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister di Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan naskah tesis ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu dalam prosesnya banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal untuk peneliti lainnya untuk meneliti topik serupa dengan objek yang berbeda.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.S., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung
4. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P. sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa studi, serta memberikan masukan, kritik, dan saran secara substansial yang membangun dan

bermanfaat dalam penyusunan tesis. Terimakasih untuk semua ilmu dan nasihatnya Bapak. Semoga Bapak dan Keluarga selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusannya oleh Allah SWT. Aamiin..

6. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping yang telah menjadi sahabat dalam diskusi dan banyak memberikan motivasi, masukan, kritik, dan saran secara kepenulisan dan substansial yang bermanfaat dalam penyusunan tesis. Seorang sosok guru yang selalu mengingatkan ketika penulis melakukan kesalahan. Terimakasih banyak atas semua ilmu dan nasihat yang Bapak berikan. Semoga Bapak dan Keluarga selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusannya oleh Allah SWT. Aamiin..
7. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. sebagai Penguji Utama sekaligus Kaprodi MIP. Seorang sosok ibunda dan guru yang selalu mengayomi dan memberikan nasihat untuk mahasiswa MIP termasuk penulis. Terimakasih Ibunda Feni atas masukan, kritik dan saran sebagai wujud penyempurnaan penyusunan tesis. Terimakasih banyak telah mendukung dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di MIP UNILA. Semoga Ibunda Feni dan Keluarga selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusannya oleh Allah SWT. Aamiin..
8. Segenap Dosen Magister Ilmu Pemerintahan UNILA dan Staf Sekretariat yang selalu membantu berbagai hal administrasi dan lainnya selama proses menyelesaikan studi.
9. Terimakasih kepada Mas Penda, Mbak Vivi dan Mbak Fitri selaku staff sekretariat MIP yang selalu membantu dalam berbagai hal administrasi dan lainnya selama proses menyelesaikan studi. Tempat bercerita dan berkeluh kesah, sukses selalu ya Mas dan Mbak-Mbak semua.
10. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Umbar dan Ibunda Parmi yang selalu memberikan seluruh kasih dan sayang, cinta dan doa serta dukungan moril maupaun materiil dan semua yang diberikan dalam hidup penulis. Tak terbalas semua pengorbanan yang ayah dan ibunda berikan hingga penulis sampai dititik ini. Semoga pencapaian ini memberikan keberkahan untuk bisa membahagiakan Ayah dan Ibunda. Doa terbaik untuk ayahanda dan

ibundaku tersayang, sehat selalu dan Panjang umur untuk melihat pencapaian-pencapaian anakmu ini. Aamiin.

11. Kakak-kakak dan adikku tersayang, Mas Muhammad Effendi dan Mbak Jumiati serta adek Bambang Purnomo. Terimakasih Mas dan mbak yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dibalik semua perjuangan penulis. Baik yang berupa materi maupun non materi, terimakasih mbak dan mas. Untuk adekku Bambang, teruslah kejar mimpi dan cita-citamu, termikasih telah memberikan semangat untuk mas bisa sampai dititik ini. Sehat selalu untuk keluargaku tersayang.
12. Untuk seorang gadis bernama Gustin Nilasari, S.Pd. yang selalu mendukung penulis untuk tetap semangat dan tegak selama menyelesaikan tesis ini. Ditengah kesibukan dan segala aktifitas nya tetap selalu mendukung Mas. Terimakasih telah memberikan support dan semangat untuk mas bisa sampai di titik ini. Semoga apa yang disemogakan akan cepat terkabul untuk kita kedepannya. Aamiin.
13. Seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi terkait penelitian ini secara komprehensif. Bapak Dr. Agus, M.Hum. selaku GM BP Geopark Merangin, Mas Jemmy Riga selaku Kasubbid Praswil BAPPEDA Kab. Merangin, Mas Eko Wahyudi selaku Geolog BP Geopark Merangin, Bapak Syafrani selaku Kepala DLH Kab. Merangin, Bapak Ali Mutahar selaku Kabid Koperasi dan UKM DKUKMPP, Ibu Weny Rahmayeni selaku Kabid seni dan kebudayaan DIKBUD Kab. Merangin, Bapak Masyur Efendi selaku kabid tata ruang dinas PUPR Kab. Merangin, Ibu Ismita selaku Pengawasa Pariwisata DISPARPORA Kab. Merangin, Abang Abdul Gopur selaku ketua POKDARWIS Dua Sahabat, Bapak Syamsul Huda selaku Pegiat Wisata di Geopark Merangin, dan Bapak Iskandar AG selaku tokoh adat situs Perkampungan Rumah Tuo Rantau Panjang. Terimakasih telah mendukung dan bersedia memberikan informasi bagi penelitian tesis Penulis.
14. Teruntuk Squad RTJM, Abangda Etro Jaya Sinaga, M.IP. terimakasih telah menjadi sahabat diskusi, panutan dan senior yang membimbing penulis hingga dititik ini. Untuk Wak Aflah, sukses selalu untuk karir PNS nya dan terimakasih telah menjadi bagian support system bagi penulis dari era S1

hingga S2 Penulis. Teruntuk Bro Aldi, seorang sahabat diskusi dalam segala bidang maupun topik, sahabat berkeluh kesah dan perjuangan. Terimakasih telah membantu penulis untuk bisa sejauh ini. Dan tak lupa, seorang sahabat karib yang dikirim Allah sebagai penuntun penulis selama di Lampung, Bro Andhika. Terimakasih telah menjadi sahabat yang sangat luar biasa dalam membantu penulis beradaptasi selama menempuh pendidikan S2 di Provinsi Lampung. Terimakasih banyak semuanya, sukses selalu untuk kita semua orang-orang hebat.

15. Teruntuk teman-teman seperjuangan di MIP 2023, Ike, Suci, Asa, Fifi, Salsa, Pak Murizal, Iko, Bang Hendra, Bang Aziz dan Bang Okta. Terimakasih telah menjadi teman seperjuangan yang memberikan warna bagi penulis selama menempuh pendidikan di MIP.

Bandar Lampung, 23 Juni 2025

Toni Roma Dona

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR ISTILAH	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Konsep <i>Collaborative Governance</i>	17
2.1.1. Pengertian <i>Collaborative Governance</i>	17
2.1.2. Teori-Teori <i>Collaborative Governance</i>	20
2.2. Pembangunan Berkelanjutan.....	26
2.2.1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	26
2.2.2. Teori-teori Pembangunan Berkelanjutan	29
2.3. Kebijakan Pengembangan Geopark di Indonesia.....	36
2.4. Kerangka Pemikiran	41
III. METODE PENELITIAN	45
3.1. Tipe Penelitian	45
3.2. Lokasi Penelitian.....	46
3.3. Fokus Penelitian	47

3.4. Informan.....	48
3.5. Jenis Dan Sumber Data.....	52
3.5.1. Data Primer.....	52
3.5.2. Data Sekunder.....	53
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.6.1. Wawancara.....	53
3.6.2. Observasi.....	54
3.6.3. Dokumentasi.....	54
3.7. Teknik Pengolahan Data.....	55
3.7.1. Editing Data.....	55
3.7.2. Interpretasi Data.....	56
3.8. Keabsahan Data.....	56
IV. GAMBARAN UMUM.....	58
4.1. Kabupaten Merangin.....	58
4.1.1. Kondisi Geografi.....	58
4.1.2. Kondisi Demografi.....	59
4.2. Geopark Merangin.....	60
4.3. Badan Pengelola Geopark Merangin.....	63
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
5.1. Gambaran Umum <i>Colaborative Governance</i> Dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Geopark Merangin.....	68
5.2. Penerapan <i>Colaborative Governance</i> Dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Geopark Merangin Jambi.....	72
5.2.1. Kondisi Awal (<i>Starting Conditions</i>).....	74
5.2.2. Fasilitasi Kepemimpinan (<i>Facilitative Leadership</i>).....	91
5.2.3. Desain Kelembagaan (<i>Institutional Design</i>).....	99
5.2.3. Proses Kolaboratif (<i>Collaborative Process</i>).....	109
5.3. Dampak <i>Collaborative Governance</i> terhadap Keberlanjutan Kawasan Geopark Merangin.....	128
5.2.1. Alam (<i>Nature</i>).....	129
5.2.2. Penunjang Kehidupan (<i>Life Support</i>).....	143

5.2.3. Dimensi Masyarakat (<i>Community</i>).....	153
5.4. Rekomendasi Strategi Untuk Meningkatkan Efektifitas Kolaborasi Dalam Perlindungan dan Pengembangan Kawasan Geopark Merangin.....	167
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	170
6.1. Kesimpulan	170
6.2. Saran	171
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Persebaran Taman Bumi atau Geopark di Indonesia tahun 2024.....	4
2. Titik Kasus PETI di Kabupaten Merangin.....	9
3. Daftar Informan Penelitian.....	49
4. Keterlibatan Aktor pada Masa Awal Pengembangan Geopark Merangin (2010–2017)	80
5. Insentif Yang Mendorong Kolaborasi antar Aktor Di Geopark Merangin.	88
6. Daftar Anggota Badan Pengelola Geopark Merangin.....	105
7. Anggaran Program Geopark Merangin Berdasarkan Instansi dan Tahun (2022–2024)	106
8. Jumlah FGD Kolaboratif Pengelolaan Geopark Merangin Tahun 2021– 2024.....	112
9. Daftar Desa Wisata Di Kawasan Geopark Merangin.....	107
10. Gambaran Peran Setiap Aktor dalam kolaborasi.	119
11. Daftar Desa Wisata Di Kawasan Geopark Merangin.....	123
12. Program Kolaborasi di Geopark Merangin	124
13. Daftar Warisan Geologi di Geopark Merangin.	129
14. Data Pemantauan Kawasan Wisata di Geopark Merangin.....	132
15. Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Geopark Merangin.	134
16. Hasil Pemantaun di kawasan Hutan Adat Serampas dan Hutan Adat Guguk.....	138
17. Kapasitas PLTMH Di Kawasan Geopark Merangin.	146
18. Jumlah wisatawan berkunjung ke Kabupaten Merangin dari tahun 2022-2024	149

19. Jumlah dan Omset UMKM di Kawasan Geopark Merangin dari 2022-2024.....	150
20. Angka Kemiskinan di Kabupaten Merangin 2021-2024	159
21. Lokasi Pelaksanaan Program Edukasi Lingkungan di Geopark Merangin.	162

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Prisma Keberlanjutan	29
2. Kerangka Pikir	43
3. Peta Administrasi Kabupaten Merangin.....	57
4. Peta Kawasan Geopark Merangin	61
5. Struktur Kelembagaan Badan Pengelola Geopark Merangin	65
6. Infrastruktur yang dibangun di kawasan Geopark Merangin.....	87
7. Rapat dan FGD Badan Pengelola Geopark Merangin	93
8. Pelatihan Pelaku Usaha Geopark Merangin.....	116
9. Pelatihan dan pengabdian Masyarakat oleh Universitas Jambi	117
10. Pembangkit Listrik pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLMTH) di Desa Rantau Kermas	120
11. Upaya Pembersihan Sisa-sisa Coretan di Situs Geologi Air Terjun Muara Karing	108
12. Daftar Anggota Badan Pengelola Geopark Merangin 2025.....	117
13. Bekas Aktifitas PETI di Sungai Kawasan Hutan Adat Guguk.....	141
14. Inovasi PLTMH sebagai Sumber listrik di Desa kawasan Geopark Merangin.	145
15. Gedung Rumah Produksi Jahe dan Bank Sampah Induk di Desa Air Batu	157
16. Acara Budaya Silek Penyudon di Desa Adat Kampung Baruh.....	164

DAFTAR ISTILAH

Geopark	:	Kawasan yang memiliki nilai geologi, biologis, dan budaya yang luar biasa, yang dikelola dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
BP Geopark	:	Lembaga yang dibentuk untuk bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan sebuah kawasan geopark.
<i>UNESCO Global Geopark (UGGp)</i>	:	Pengakuan internasional dari UNESCO untuk geopark yang menunjukkan manajemen berkelanjutan atas warisan geologi.
<i>Geoheritage (Warisan Geologi)</i>	:	Keragaman geologi bernilai tinggi karena keunikan, kelangkaan, dan nilai ilmiahnya.
<i>Collaborative Governance</i>	:	Pendekatan tata kelola publik yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif secara partisipatif, deliberatif, dan berbasis consensus.
Pembangunan Berkelanjutan	:	Upaya terpadu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang (ekonomi, sosial, lingkungan).
<i>Geotourism</i>	:	Bentuk pariwisata berkelanjutan yang mempromosikan warisan geologi dan budaya lokal sambil menjaga kelestarian alam.
<i>Destination Linkage</i>	:	Konsep yang menghubungkan berbagai aspek dalam sebuah destinasi (seperti wisata, ekonomi, budaya, dll) untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pengalaman bagi pengunjung.

DAFTAR SINGKATAN

BP Geopark	: Badan Pengelola Geopark
UGGp	: UNESCO Global Geopark
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
DIKBUD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DISPARPORA	: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
DKUKMPP	: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
POKDARWIS	: Kelompok Sadar Wisata
KKI WARSI	: Komunitas Konservasi Indonesia Warsi
UNJA	: Universitas Jambi
UU	: Undang-Undang
PERDA	: Peraturan Daerah
PERBUP	: Peraturan Bupati
PERMEN	: Peraturan Menteri
PETI	: Penambangan Emas Tanpa Izin

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke memiliki posisi geografis yang unik dan strategis. Wilayahnya terletak di sepanjang Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*), sebuah kawasan yang dikenal sebagai salah satu jalur seismik dan vulkanik paling aktif di dunia (Setiawan dkk., 2022:669). Kawasan Cincin Api Pasifik membentang sepanjang 25.000 mil dan mencakup sekitar 450 gunung api aktif. Hal ini berakibat pada rawannya daerah-daerah di Indonesia mengalami gempa. Secara tidak langsung keadaan ini menjadikan Indonesia memiliki wilayah yang subur yang didukung oleh iklim yang tropis.

Gunung-gunung api yang tersebar di sepanjang kepulauan Indonesia telah meninggalkan jejak geologi yang unik di berbagai wilayah, yang kemudian dikenal sebagai warisan geologi. Merujuk pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 2 Tahun 2021, warisan geologi (*geoheritage*) merupakan bagian dari keragaman geologi (*geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena merekam proses geologi yang pernah atau sedang terjadi di bumi. Keunikan ini didasarkan pada nilai ilmiah yang tinggi, kelangkaan, keunikan, serta keindahannya, sehingga memiliki manfaat besar untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumihan.

Warisan geologi merupakan aset berharga yang harus dilestarikan untuk mendukung edukasi dan riset di masa depan. Menurut Jaya dkk. (2023:2), keberadaan objek warisan geologi memiliki potensi besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari penelitian, pengembangan ilmu kebumihan, hingga pendidikan dan pelestariannya sebagai rekaman sejarah bumi. Selain itu, melalui pengembangan *geotourism* serta berbagai bentuk pariwisata berkelanjutan lainnya. Warisan geologi tidak hanya berkontribusi pada

pelestarian lingkungan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan nilai sosial dan ekonomi di tingkat lokal, regional, hingga nasional.

Menurut Brilha dkk. (2016:130), penetapan dan pengembangan warisan geologi atau *geoheritage* sebagai kawasan wisata dapat menimbulkan risiko degradasi lingkungan jika tidak dikelola secara berkelanjutan. Peningkatan jumlah wisatawan, pembangunan infrastruktur, serta eksploitasi sumber daya di sekitar kawasan berpotensi merusak warisan geologi yang seharusnya dilestarikan. Pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat setempat (Angela, 2023:85). Strategi ini mencakup penerapan regulasi ketat, pengawasan aktivitas wisata, serta edukasi lingkungan bagi masyarakat dan wisatawan guna memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak mengorbankan kelestarian *geoheritage*.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menekankan pentingnya pelestarian lingkungan, termasuk kawasan dengan nilai geologi, biologi, dan budaya yang tinggi. Undang-undang ini mencakup prinsip pembangunan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam. Salah satu konsep perlindungan yang lahir dari upaya konservasi lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan adalah konsep Taman Bumi atau *Geopark*. Menurut *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* atau yang lebih dikenal dengan UNESCO (dalam Rahmasari dan Parameswari, 2020:184), *Geopark* adalah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka yang melibatkan masyarakat setempat dalam pelestarian dan pengembangan warisan alam, termasuk nilai ekologi, arkeologi, dan budaya.

Zouros (2004:165) menegaskan bahwa *Geopark* merupakan kawasan yang memiliki warisan geologi bernilai tinggi dan diakui secara global, di mana nilai-nilai tersebut tidak hanya dijaga kelestariannya, tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Eder dan Patzak (2004:162) menekankan bahwa *Geopark* harus

berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pemanfaatan warisan geologi secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan *Geopark* harus mencerminkan keseimbangan antara pelestarian alam dan pemanfaatannya yang bertanggung jawab, sehingga tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Konsep *geopark* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990-an dan diterapkan di empat kawasan di Eropa, yaitu Haute Provence Geopark (Prancis), Maestrazgo/Terruel Geopark (Spanyol), Lesvos Island Geopark (Yunani), dan Vulkaneifel Geopark (Jerman). *Geopark* merupakan bagian dari program UNESCO yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya dan alam melalui pendekatan konservasi, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, konsep *geopark* mulai diperkenalkan sekitar tahun 2008 (geoparksnetwork.id, 2024), dan sejak itu mengalami perkembangan pesat. Geopark Batur di Bali menjadi *geopark* pertama di Indonesia yang memperoleh pengakuan dari UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark pada tahun 2012, yang sebelumnya disebut Geopark Global dan berganti nama menjadi *Geopark Global UNESCO (UGGp)* pada 2015. Keberhasilan ini mendorong pengembangan geopark lainnya di Indonesia, termasuk penetapan *Geopark Nasional Merangin* di Provinsi Jambi pada tahun 2013 dan *Geopark Nasional Toba* di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014. Upaya ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam melestarikan warisan geologi sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan di berbagai daerah.

Konsep geopark memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan konsep konservasi alam lainnya, seperti taman nasional atau cagar alam. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2019, *geopark* dikembangkan dengan mengusung tiga fungsi utama, yaitu sebagai kawasan konservasi, edukasi, dan ekonomi. Sebagai kawasan konservasi, *geopark* berperan dalam melindungi warisan geologi, biodiversitas, serta budaya setempat agar tetap lestari. Dalam fungsi edukasi, geopark menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat,

akademisi, dan wisatawan untuk memahami proses geologi serta pentingnya pelestarian lingkungan. Sementara itu, dari sisi ekonomi, *geopark* diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pengembangan pariwisata berbasis geotourism serta pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan, sehingga keseimbangan antara pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan dapat tercapai.

Menurut catatan Kemenparekraf (2024), terdapat 12 kawasan Geopark yang berstatus diakui oleh UNESCO melalui badan UNESCO Global Geopark (UGGp). Jumlah ini merupakan pencapaian yang luar biasa dimana dari 20 Geopark nasional, 12 diantaranya sudah diakui UNESCO. Pengakuan ini mencerminkan pencapaian luar biasa dalam upaya konservasi dan pengelolaan Geopark di Indonesia, menunjukkan betapa pentingnya peran Geopark dalam mempromosikan warisan geologi, ekologi, dan budaya secara global.

Tabel 1. Persebaran Taman Bumi atau Geopark di Indonesia tahun 2024.

No.	Nama Geopark	Lokasi	Status
1	Geopark Batur	South Batur, Kintamani, Bangli Regency, Bali	Geopark UNESCO Global
2	Geopark Gunung Sewu	Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Geopark UNESCO Global
3	Geopark Ciletuh Palabuhanratu	Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	Geopark UNESCO Global
4	Geopark Rinjani-Lombok	Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat	Geopark UNESCO Global
5	Geopark Kaldera Toba	Kabupaten Samosir, Sumatera Utara	Geopark UNESCO Global
6	Geopark Belitong	Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung	Geopark UNESCO Global
7	Geopark Ijen	Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur	Geopark UNESCO Global
8	Geopark Maros Pangkep	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Geopark UNESCO Global
9	Geopark Merangin Jambi	Kabupaten Merangin, Jambi	Geopark UNESCO Global
10	Geopark Raja Ampat	Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat	Geopark UNESCO Global
11	Geopark Nasional Meratus	Kalimantan Selatan	Geopark UNESCO Global
12	Geopark Nasional Kebumen	Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah	Geopark UNESCO Global
13	Geopark Nasional Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Geopark Nasional
14	Geopark Nasional Ngarai Sianok	Kabupaten Agam, Sumatera Barat	Geopark Nasional
15	Geopark Nasional Sawahlunto	Kota Sawahlunto, Sumatera Barat	Geopark Nasional

No.	Nama Geopark		Lokasi	Status
16	Geopark Ranah Minang Silokek	Nasional	Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat	Geopark Nasional
17	Geopark Pongkor	Nasional	Kabupaten Bogor, Jawa Barat	Geopark Nasional
18	Geopark Bojonegoro	Nasional	Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur	Geopark Nasional
19	Geopark Tambora	Nasional	Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB)	Geopark Nasional
20	Geopark Ujung Kulon	Nasional	Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten	Geopark Nasional

Sumber: geoparksnetwork.id, (2024).

Geopark Merangin Jambi atau biasa disebut Geopark Merangin merupakan satu dari 12 Geopark di Indonesia yang termasuk status UNESCO Global Geopark (UGGp). Berdasarkan laporan Badan Pengelola Geopark Merangin (2024), kawasan ini dikenal karena keunikannya warisan geologi yang luar biasa terutama dalam kaitannya dengan penemuan fosil flora yang berusia lebih dari 300 juta tahun. Penelitian Jufrida dkk. (2018:83) mengungkapkan bahwa fosil-fosil ini berasal dari periode Permian Awal (*Paleozoikum*) yang ditemukan di Sungai Merangin dengan lapisan batuan setebal 500 meter. Warisan ini setara hanya dengan temuan fosil flora karbon di Jerman (*Rhineland*), Skotlandia, dan sebagian Rusia. Dan tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Ini menjadikan warisan geologi yang ada di Geopark Merangin sebagai salah satu fosil flora terbaik dan terlengkap di dunia.

Warisan geologi ini didukung dengan kekayaan flora dan fauna yang ada didalamnya. Sebagian dari kawasan ini merupakan warisan hutan hujan tropis Sumatera yang memiliki 4000 spesies flora langka salah satunya adalah Padma Raksasa (*Rafflesia Arnoldi*). Fauna yang ada didalamnya pun tidak kalah beragam, dimana terdapat 372 spesies fauna (Harimau Sumatera, Beruang Madu, Siamang dan Burung Kuau). Catatan DLH Kab. Merangin (2023) menunjukkan bahwa kawasan ini mendukung adanya 320 spesies Ikan air tawar yang tersebar sepanjang aliran Sungai-suangai besar di Kawasan Kab. Merangin. Kekayaan dan nilai kawasan Geopark Merangin ini menjadikan kawasan ini dilindungi dan diakui melalui SK Kepala Badan Geologi No. 130.K/04/BGL/2012 serta diakui sebagai Geopark Nasional pada tahun 2013.

Sejak saat itu, kawasan ini dirancang untuk menuju pengakuan sebagai Geopark Global oleh UNESCO.

Perjalanan menuju status Geopark Global UNESCO membutuhkan banyak upaya, pemerintah daerah dihadapkan pada kenyataan terbatasnya kapasitas untuk mengelola kawasan seluas lebih dari 4.800 km², yang mencakup lebih dari 62% wilayah administratif Kabupaten Merangin. Keterbatasan ini meliputi anggaran, SDM, kewenangan, banyaknya pihak yang terlibat hingga jangkauan kawasan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Taman Bumi, yang secara tegas menginisiasi kerangka kerja kolaboratif dalam pengelolaan *geopark*. Regulasi ini menandai pergeseran paradigma dari model pengelolaan yang bersifat *top-down* menuju pendekatan *collaborative governance*, yang menekankan peran aktif semua aktor baik pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas lokal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhajir (2019:1), regulasi yang komprehensif ini tidak hanya memperkuat kedudukan hukum Geopark, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan kawasan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan terarah.

Pendekatan ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Geopark, yang secara eksplisit menekankan pentingnya keterlibatan multipihak dalam membangun sistem pengelolaan yang terintegrasi antara konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Regulasi ini lahir sebagai respons terhadap berbagai tantangan tata kelola geopark di Indonesia, khususnya fragmentasi kelembagaan dan sektoral yang selama ini menghambat efektivitas pengelolaan Geopark di Indonesia. Isu fragmentasi dalam pengelolaan Geopark mencerminkan tidak adanya koordinasi yang terpusat dan lintas sektor antara berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah. Masing-masing sektor cenderung menjalankan kebijakan berdasarkan kepentingannya sendiri tanpa sinergi yang memadai, sehingga menciptakan

tumpang tindih program, duplikasi kewenangan, serta inkonsistensi dalam pencapaian tujuan konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Keterlibatan aktor non-negara seperti komunitas lokal, universitas, dan pelaku usaha pariwisata seringkali sudah berjalan secara organik dan partisipatif di lapangan. Namun, keterlibatan tersebut belum diakomodasi secara formal dalam kerangka hukum yang mengikat dan belum menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan yang terstruktur. Hal ini memperlebar jurang koordinasi antara negara dan non-negara dalam pengelolaan kawasan Geopark. Perpres No. 9 Tahun 2019 hadir untuk menjawab isu tersebut dengan mendorong pembentukan sistem kolaboratif yang menempatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar inisiatif sukarela. Dalam konteks ini pendekatan *collaborative governance* menjadi strategi utama untuk menjembatani fragmentasi tersebut melalui pembentukan ruang dialog dan kerja sama yang inklusif.

Emerson dan Nabatchi (dalam Noor dkk., 2022:52) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu praktik tata kelola publik yang terstruktur, di mana aktor pemerintah dan non-pemerintah bekerja bersama dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Geopark Merangin, pendekatan ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah diwujudkan secara kelembagaan melalui pembentukan Badan Pengelola Geopark Merangin (BP Geopark Merangin) oleh Pemerintah Daerah. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah koordinatif untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dan inisiatif dari lintas sektor, serta menjadi platform resmi dalam penerapan kolaborasi antar-stakeholder.

Lembaga ini berfungsi sebagai forum koordinatif untuk mengintegrasikan berbagai inisiatif dan kepentingan lintas sektor, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, hingga pelaku usaha. Pembentukan BP Geopark Merangin selaras dengan pernyataan Ansell dan Gash (2007:545), yang menegaskan bahwa salah satu ciri esensial *collaborative governance* adalah terbentuknya institusi atau forum kolaboratif yang diprakarsai oleh negara untuk

mengakomodasi partisipasi aktor non-negara yang terlibat. Lembaga ini menjadi manifestasi konkret dari tata kelola kolaboratif, yang tidak hanya bersifat konsultatif tetapi juga operasional dalam menjalankan fungsi pelestarian, edukasi, pemberdayaan, dan pengembangan kawasan geopark secara berkelanjutan.

Penguatan kerangka hukum terhadap pengelolaan dan perlindungan Geopark Merangin semakin menunjukkan urgensi kolaborasi sebagai prinsip dasar dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa kolaborasi merupakan bagian penting dari upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan geopark. Lebih lanjut, pengaturan di tingkat nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Geopark, khususnya Pasal 4 ayat (3), menekankan bahwa pengembangan geopark harus mengutamakan destinasi pariwisata. Namun demikian, pendekatan ini tidak boleh hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, melainkan harus terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Artinya, selain aspek konservasi, pengembangan geopark juga harus menjamin tercapainya keseimbangan antara manfaat ekonomi, keberlanjutan ekosistem, dan pelestarian budaya lokal. Dalam konteks ini, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci, di mana masing-masing aktor pemerintah, akademisi, masyarakat, pelaku usaha, dan LSM memiliki peran strategis dalam menjaga integritas kawasan.

Implementasinya di Indonesia, terdapat tantangan dalam menerapkan tata kelola kolaborasi di dalam pengelolaan dan perlindungan Geopark. Pengalaman Geopark Toba dan Geopark Raja Ampat menjadi cerminan nyata bagaimana kegagalan koordinasi dan dominasi kepentingan ekonomi dapat merusak tujuan geopark secara keseluruhan. Seperti dilaporkan oleh VOA Indonesia (2023), Geopark Toba mendapat peringatan dari UNESCO berupa “kartu kuning” karena lemahnya tata kelola, kurangnya sinergi antar-lembaga, serta orientasi wisata yang tidak terkendali dan abai terhadap kelestarian. Ancaman serupa terjadi di Geopark Raja Ampat, di mana eksploitasi tambang nikel oleh 13 perusahaan

dalam wilayah geopark sebagaimana dilaporkan Greenpeace Indonesia (2025). Kasus ini menjadi bukti konkret betapa lemahnya integritas kawasan akibat absennya pendekatan kolaboratif dalam tata kelola. Dua contoh tersebut memberikan pelajaran penting bagi Geopark Merangin, bahwa tanpa sinergi dan kolaborasi yang kuat, pengakuan internasional semata tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan kawasan. Maka dari itu, implementasi regulasi yang mengamankan kolaborasi harus diikuti dengan desain kelembagaan yang adaptif, partisipatif, dan mampu mengakomodasi kepentingan lintas sektor secara seimbang.

Kondisi serupa juga dialami Geopark Merangin, meskipun telah memperoleh pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan ini belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan Laporan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merangin (2024), ditemukan bahwa setelah adanya kolaborasi dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan, muncul kasus-kasus Penambangan Emas Tanpa Izin atau Peti yang terjadi di kawasan Geopark Merangin.

Tabel 2. Titik Kasus PETI di Kab. Merangin.

No.	Kecamatan	Titik	Luas Area kerusakan (Hektar)
1.	Tabir	19	23
2.	Bangko	2	424
3.	Lembah Masurai	4	30
4.	Sungai Manau	6	171
5.	Muara siau	24	400
Jumlah Total		55	1048

Sumber: DLH Kabupaten Merangin (2024).

Kelima kecamatan merupakan bagian dari Geopark Merangin Jambi berdasarkan Peta resmi yang dikeluarkan oleh Pemkab Merangin. Kasus ini menjadikan gambaran ancaman serius bagi upaya konservasi dan pengembangan wisata berkelanjutan di Geopark Merangin. Data lain data BP Geopark Merangin (2024) menunjukkan ancaman kerusakan situs geologi oleh aktivitas wisata yang tidak terkontrol di beberapa titik kawasan inti. Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2023 dimana terjadi kasus vandalisme di situs Muara Karing yang

dilakukan oleh pengunjung. Kawasan ini memiliki warisan geologi yang sangat penting, salah satunya berupa fosil tumbuhan purba yang tersebar di sepanjang aliran sungai Batang Merangin.

Situasi ini menimbulkan dilema dan tantangan antara pengembangan pariwisata yang inklusif dan upaya konservasi yang ketat, yang semestinya bisa diseimbangkan melalui pendekatan kolaboratif yang efektif dan adaptif. Idealnya, kedua kepentingan ini dapat berjalan secara seimbang melalui pendekatan *collaborative governance* yang menekankan pada partisipasi lintas aktor dan pengambilan keputusan bersama. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara kerangka regulasi yang ideal dengan pelaksanaan dilapangan.

Fenomena ini menimbulkan ketidak selarasan dengan tujuan regulasi yang ada saat ini yaitu Perda Kabupaten Merangin No. 2 tahun 2018 dan Perpres No. 9 tahun 2019, yang mengamanatkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan sebagai bagian untuk mendukung upaya konservasi situs geologi di kawasan Geopark. Kedua regulasi tersebut secara tegas mengamanatkan pengembangan geopark yang berkelanjutan, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui sektor pariwisata, tetapi juga menjaga kelestarian kawasan geopark merangin. Hal ini juga menimbulkan sebuah pertentangan dari pandangan O'Leary et al. (dalam Kuniadi, 2020:39), yang mengemukakan bahwa *collaborative governance* merupakan opsi terbaik dalam penyelenggaraan kebijakan oleh pemerintah. Ketidaktercapaian tujuan ini mengindikasikan perlunya evaluasi kritis terhadap keberhasilan pendekatan kolaboratif yang telah diterapkan, termasuk sejauh mana forum kolaborasi mampu menjembatani kepentingan pembangunan dan konservasi secara adil dan seimbang.

Penelitian mengenai model *collaborative governance* dalam pengelolaan warisan geologi juga dijelaskan pernah dilakukan Berliandaldo dan Fasa (2022) yang membahas tentang “*Pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi: Perspektif collaborative governance*”.

Menggunakan teori Ansell dan Gash sebagai landasan analisis hubungan antarpemangku kepentingan, serta mengusulkan model pentahelix sebagai pendekatan kolaboratif strategis. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pentingnya peran aktor, struktur kelembagaan, dan sinergi lintas sektor termasuk media untuk mendukung efektivitas pengelolaan geowisata. Sementara itu, penelitian ini juga menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash untuk mengkaji penerapan kolaborasi dalam pengelolaan dan perlindungan Geopark Merangin, namun memiliki fokus berbeda. Fokusnya yakni mengevaluasi sejauh mana kolaborasi tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara fungsi konservasi dan pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dengan tambahan kerangka teori pembangunan berkelanjutan, penelitian ini tidak hanya memetakan bentuk kolaborasi, tetapi juga menilai dampaknya terhadap tercapainya tujuan pembangunan kawasan geopark yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kemudian penelitian lain dari Utomo dkk. (2024) berjudul "*Collaborative governance Model Belitung UNESCO Global Geopark*" yang menganalisis tata kelola kolaboratif dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan di Belitung sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Penelitian ini menggunakan teori Ansell dan Gash untuk mendalami aspek kolaborasi serta pendekatan eksploratori dengan metode sekuensial, yang melibatkan wawancara, tinjauan dokumen, dan survei. Hasilnya menunjukkan pentingnya elemen kepercayaan, nilai-nilai, dan jaringan sosial dalam membangun kolaborasi. Penelitian ini memberikan gambaran tentang proses kolaborasi yang efektif dalam konteks *geopark global*. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup dan pendekatan evaluative. Dimana penelitian penulis tidak hanya mengidentifikasi dinamika kolaborasi, tetapi juga menganalisis secara mendalam sejauh mana pendekatan tersebut berkontribusi terhadap terciptanya keseimbangan antara fungsi konservasi, dan pemberdayaan Masyarakat melalui pembangunan pariwisata berkelanjutan. Ini diperkuat dengan mengintegrasikan

teori pembangunan berkelanjutan dari Kates et al. sebagai alat ukur dampak kolaborasi.

Penelitian Munawar (2023) yang berjudul "*Pengelolaan Geopark untuk Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus di Geopark Ciletuh-Palabuhanratu)*" menitikberatkan pada tantangan keberlanjutan pariwisata di tengah krisis iklim dan pemanasan global. Fokus penelitian tersebut adalah pada bagaimana *Geopark* dapat menjadi solusi berbasis alam yang mendukung pemanfaatan sumber daya secara lestari, serta menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan destinasi. Meskipun sama-sama menyoroti aspek keberlanjutan dan pentingnya peran masyarakat, penelitian ini tidak secara eksplisit menggunakan kerangka teori *collaborative governance* maupun pendekatan struktural terhadap kolaborasi antarpemangku kepentingan. Sebaliknya, penelitian penulis menggabungkan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash untuk mengkaji pola interaksi dan tata kelola kolaboratif, serta teori pembangunan berkelanjutan Kates et al. (2005) untuk menganalisis dampak kolaborasi tersebut terhadap keseimbangan antara fungsi konservasi dan pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan pariwisata di kawasan Geopark Merangin.

Penelitian Hidayat dan Husni (2022) yang berjudul "Peran Geopark Rinjani Lombok Sebagai Pilar Pariwisata Berkelanjutan Di Nusa Tenggara Barat" mengkaji peran Geopark sebagai pendorong utama pariwisata berkelanjutan dengan menggunakan kerangka empat pilar sebagaimana diatur dalam Permenpar No. 14 Tahun 2016, yakni pengelolaan destinasi, manfaat ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. Penelitian ini menekankan pada kontribusi geopark terhadap pembangunan daerah melalui pendekatan sektoral yang fokus pada dampak pariwisata secara umum. Berbeda dengan penelitian ini, yang tidak hanya menilai hasil pengelolaan geopark dari sudut keberlanjutan, tetapi juga secara mendalam mengkaji proses tata kelola kolaboratif antara aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam kerangka teori *collaborative governance* (Ansell dan Gash). Penelitian ini juga mengombinasikan teori pembangunan berkelanjutan Kates et al. (2005) untuk

menganalisis secara lebih komprehensif bagaimana kolaborasi dapat menciptakan keseimbangan antara konservasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Geopark Merangin.

Penelitian Fadisa dkk. (2021) yang berjudul "*Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan pada Kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau di Kota Bukittinggi*" berfokus pada bagaimana visi dan misi pemerintah daerah mendorong pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan teori pariwisata berkelanjutan oleh John Swarbrooke, penelitian ini menganalisis tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan geopark membawa dampak positif terhadap pendapatan daerah serta tidak menyebabkan kerusakan signifikan terhadap lingkungan. Penelitian ini menekankan peran pemerintah sebagai penggerak utama, serta perlunya pembinaan masyarakat lokal dalam mendukung pelayanan wisata. Berbeda dengan penelitian penulis, yang tidak hanya menilai dampak pembangunan geopark terhadap pariwisata berkelanjutan, tetapi juga menekankan pada proses tata kelola kolaboratif antarpemangku kepentingan. Pendekatan yang digunakan adalah teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash untuk menganalisis proses kolaborasi, serta teori pembangunan berkelanjutan Kates et al. (2005) untuk menilai dampaknya terhadap keseimbangan antara konservasi dan pemberdayaan masyarakat di Geopark Merangin.

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa tema pengelolaan geopark dengan pendekatan kolaboratif telah menjadi perhatian utama dalam studi-studi tentang geopark di Indonesia. Berbagai penelitian tersebut, seperti yang dilakukan oleh Berliandaldo dan Fasa (2022), Utomo dkk. (2024), serta Munawar (2023), mengungkapkan pentingnya peran kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pelestarian warisan geologi, serta pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih fokus pada pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah, dengan sedikit penekanan pada dinamika interaksi antar pemangku kepentingan yang lebih dalam, serta keseimbangan antara konservasi

dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks geopark yang terintegrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Husni (2022) serta Fadisa dkk. (2021) juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman pembangunan pariwisata berkelanjutan, tetapi belum memfokuskan pada model kolaborasi yang terstruktur dan adaptif dalam pengelolaan geopark.

Penelitian ini hadir dengan kebaruan yang lebih spesifik, dengan mengkaji penerapan pendekatan *collaborative governance* dalam konteks pengelolaan dan perlindungan Geopark Merangin. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, tetapi juga berfokus pada seberapa jauh kolaborasi ini dapat menciptakan keseimbangan antara fungsi konservasi warisan geologi dan pemberdayaan masyarakat, sambil mempertimbangkan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pendekatan ini sangat relevan mengingat tantangan yang dihadapi oleh Geopark Merangin dalam menjaga kelestarian alam sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Selain itu, fokus pada model tata kelola yang melibatkan kerjasama antar sektor pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam upaya menciptakan kebijakan yang lebih adaptif menjadi kontribusi baru dalam literatur tentang geopark di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menemukan solusi yang dapat mengintegrasikan fungsi konservasi dengan pengembangan pariwisata, sekaligus melindungi warisan geologi yang bernilai tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh Geopark Merangin, seperti ancaman kerusakan situs geologi dan permasalahan sosial-ekonomi lokal, memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif seluruh pihak terkait. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan model kolaborasi yang efektif yang dapat diadopsi oleh kawasan geopark lainnya di Indonesia, sehingga pengelolaan geopark dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.

Maka dari fenomena-fenomena tersebut, penelitian ini mengambil judul “*Collaborative governance* Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Geopark Merangin Jambi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Geopark Merangin?
2. Bagaimana dampak penerapan *collaborative governance* melalui pengembangan pariwisata terhadap keberkelanjutan kawasan Geopark Merangin?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan destinasi wisata di Geopark Merangin.
2. Untuk mendeskripsikan dampak dari penerapan *collaborative governance* melalui pengembangan pariwisata terhadap keberlanjutan kawasan Geopark Merangin.

1.4. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu upaya memberikan manfaat bagi Masyarakat secara luas. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah literatur mengenai penerapan pendekatan *collaborative governance* dalam

pengelolaan dan perlindungan kawasan geopark, khususnya di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, maupun sektor swasta, dapat menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori pembangunan berkelanjutan dengan mengaplikasikan dimensi nature, life support, dan community dalam konteks geopark, yang dapat menjadi referensi dalam kajian-kajian serupa di kawasan geopark lain. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dalam pemahaman tentang dinamika kolaboratif dalam mengelola sumber daya alam dan mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan dan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pengelola Geopark Merangin, serta masyarakat lokal, dalam mengelola dan melindungi kawasan Geopark Merangin secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan keseimbangan antara konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan pariwisata. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat digunakan untuk menyempurnakan kebijakan pengelolaan geopark, serta memperkuat peran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian warisan geologi yang ada, sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi lokal melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep *Collaborative governance*

2.1.1. Pengertian *Collaborative governance*

Collaborative governance merupakan pendekatan yang semakin penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Menurut Ansell dan Gash (2008:544), *collaborative governance* didefinisikan sebagai suatu pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan atau menerapkan kebijakan publik serta mengelola program atau aset publik, dengan kerangka kerja yang diatur secara formal dan jelas. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan beragam aktor dalam pengelolaan suatu wilayah atau sumber daya, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta kepentingan berbagai pihak.

Pandangan lain yang dikemukakan oleh Emerson et al. (2012:3) memperluas pemahaman mengenai *collaborative governance* sebagai suatu proses dan struktur yang memfasilitasi pengambilan keputusan kebijakan publik serta manajemen lintas sektor, dengan melibatkan kerja sama yang konstruktif antar berbagai aktor yang melintasi batas-batas institusi publik, tingkatan pemerintahan, serta sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini dibangun atas kesadaran bahwa kompleksitas masalah kebijakan saat ini membutuhkan respons yang inklusif dan partisipatif.

Sejalan dengan itu, Balogh (dalam Febrian, 2016:203) juga menegaskan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu bentuk pengelolaan kebijakan yang menempatkan kerja sama antara aktor-aktor lintas sektor dan tingkat pemerintahan sebagai inti proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, *collaborative governance* tidak hanya mencerminkan partisipasi, tetapi juga menunjukkan adanya struktur formal yang mengatur proses interaksi antar aktor demi mencapai tujuan bersama. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu pendekatan strategis dalam tata kelola yang bersifat partisipatif, deliberatif, dan berorientasi pada hasil publik yang berkelanjutan. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan kawasan Geopark Merangin, yang menuntut sinergi lintas sektor untuk mencapai keseimbangan antara konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

Collaborative governance lahir pada masa paradigma *governance*, ketika perkembangan teknologi dan sumber daya manusia membuat pemerintah menghadapi masalah-masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan sendiri tanpa melibatkan aktor-aktor di luar pemerintahan. Charalabidis dan Loukis (dalam Maysarah dan Wahyudi, 2023:139) menjelaskan bahwa konsep *collaborative governance* muncul untuk menangani permasalahan publik yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah secara mandiri, karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan non-pemerintah menjadi penting dalam proses kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Gray dkk. (dalam Noor dkk., 2022:44), yang menyebut *collaborative governance* sebagai instrumen kebijakan publik yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai solusi yang lebih efektif dan inklusif.

Ansell dan Gash (2008:544-545) memberikan definisi *collaborative governance* dengan menekankan enam kriteria penting yang menjadi ciri khas kebijakan ini, yaitu:

1. Inisiatif dimulai oleh badan publik.

2. Terdapat keterlibatan aktor non-pemerintah.
3. Para peserta atau aktor terlibat langsung dalam perancangan kebijakan.
4. Forum diselenggarakan secara formal dan bersifat kolektif.
5. Keputusan yang diambil didasarkan pada mufakat atau konsensus.
6. Fokus kerjasama adalah pada kebijakan publik atau pengelolaan program publik.

Dwiyanto (dalam Febrian, 2016:203) menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam kerjasama kolaboratif, terdapat penyampaian visi, tujuan, strategi, dan aktivitas antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun setiap pihak memiliki otoritas independen untuk mengambil keputusan dan mengelola organisasinya, mereka tetap tunduk pada kesepakatan bersama. Hal ini menekankan pentingnya sinergi dalam kolaborasi, di mana para pihak bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, namun tetap mempertahankan kemandirian dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi masing-masing.

Noor dkk. (2022:55) berpendapat bahwa konsep *collaborative governance* memiliki potensi untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan atau program. Untuk mencapai hal ini, diperlukan interaksi yang efektif di antara aktor-aktor yang terlibat. Agar kesalahpahaman yang bisa memicu konflik dapat dihindari, penting untuk melakukan pemetaan terhadap aktor-aktor berdasarkan peran masing-masing. Pemetaan ini berfungsi untuk menghasilkan kebijakan yang memberikan dampak positif bagi kepentingan publik (*public interest*) dan menambah nilai bagi masyarakat (*public value*).

Dalam pandangan lain O'Leary et al. (dalam Kuniadi, 2020:39) mengemukakan *collaborative governance* merupakan opsi terbaik dalam penyelenggaraan kebijakan oleh pemerintah. Hal ini didasarkan pada beberapa argumen utama. Pertama, masalah publik semakin kompleks dan sulit diatasi oleh pemerintah secara mandiri. Kedua, beberapa organisasi pemerintah telah melakukan outsourcing untuk meningkatkan kapasitas

mereka. Ketiga, terjadi perubahan signifikan dalam hubungan antarpemerintah di berbagai tingkat. Keempat, model ini mampu meningkatkan efektivitas program atau kebijakan yang dijalankan. Kelima, perkembangan teknologi telah mempermudah pertukaran informasi dalam proses pengambilan keputusan. Terakhir, *collaborative governance* memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Collaborative governance sebagai bentuk baru dari *governance* memiliki empat nilai dasar yang penting untuk dipahami dalam menganalisis fenomena dan membentuk teori baru dalam kebijakan publik. Nilai-nilai ini membantu membedakan apakah suatu fenomena termasuk dalam *collaborative governance* atau tidak. Dewi (2019:254-256), mengemukakan nilai-nilai ini sebagai berikut:

1. Orientasi Konsensus
2. Kepemimpinan Kolektif
3. Komunikasi Multiarah
4. Berbagi Sumber Daya

Penjelasan ini menegaskan bahwa *collaborative governance* tidak hanya sebat/as kerja sama antaraktor, tetapi juga mencakup pengelolaan yang sistematis dari aspek-aspek penting seperti struktur organisasi, komunikasi multiarah, dan pemanfaatan sumber daya. Dalam kerangka ini, setiap elemen dikelola secara kolektif dengan tujuan untuk menghasilkan kebijakan atau program yang mampu memberikan dampak positif bagi kepentingan publik. Nilai-nilai dasar dari *collaborative governance* berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa kolaborasi ini berjalan secara efektif, dengan setiap aktor memiliki peran yang signifikan dalam mencapai tujuan bersama.

2.1.2. Teori-Teori *Collaborative Governance*

Emerson, Nabachi, dan Balogh (dalam Kurniadi, 2020:55) memperkenalkan sebuah model yang dikenal sebagai *Integrative Framework for Collaborative Governance* yang menawarkan pendekatan komprehensif dalam memahami dan menganalisis proses kolaborasi di dalam tata kelola publik. Model ini dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan model-model sebelumnya yang tidak sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas interaksi antara berbagai aktor dalam *collaborative governance*. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kolaborasi antara sektor publik dan non-publik, tetapi juga mengakui peran vital yang dimainkan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta. Melalui model ini, Emerson et al. menyoroti pentingnya memahami dinamika hubungan antar aktor, pengelolaan konflik, serta pembagian sumber daya sebagai elemen kunci dalam mencapai hasil kolaboratif yang efektif.

Model *Integrative Framework* tersebut memberikan pandangan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan berbagai dimensi penting yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi. Kerangka ini tidak hanya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, tetapi juga menyoroti faktor-faktor dinamis seperti interaksi antara aktor, pengelolaan konflik, pembagian sumber daya, serta pentingnya membangun kepercayaan dan komitmen di antara para pemangku kepentingan. Melalui model ini Emerson et al, (dalam Kurniadi, 2020:57) membagi 3 dimensi dalam konsep kolaboratif, yaitu:

1. *System context*

Komponen ini mencakup kondisi dan lingkungan di mana kolaborasi terjadi. Ini melibatkan analisis faktor-faktor eksternal seperti kebijakan yang ada, struktur pemerintahan, konteks sosial dan ekonomi, serta sejarah interaksi antara aktor yang terlibat. Memahami konteks sistem

ini penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin muncul dalam proses kolaborasi. Dengan pemahaman yang baik tentang konteks ini, para aktor dapat lebih efektif merancang strategi kolaboratif yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika lokal

2. *Driver*

Driver mengacu pada faktor-faktor yang mendorong aktor untuk berkolaborasi. Ini bisa termasuk kebutuhan untuk menyelesaikan masalah publik yang kompleks, keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan, serta tekanan dari masyarakat atau lembaga lain untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Identifikasi driver ini penting untuk memahami motivasi di balik kolaborasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat komitmen dan keterlibatan aktor dalam proses tersebut.

3. *Collaborative dynamics*

Komponen ini menyoroiti bagaimana interaksi antar aktor berlangsung selama proses kolaborasi. Ini mencakup pola komunikasi, pengambilan keputusan, serta cara konflik dikelola. Dinamika kolaboratif yang efektif dapat mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, menciptakan suasana saling percaya, dan memastikan bahwa semua suara didengar dalam proses pengambilan keputusan. Pemahaman tentang dinamika ini membantu dalam merancang mekanisme kolaboratif yang dapat memfasilitasi interaksi yang produktif dan menghasilkan keputusan yang berorientasi pada kepentingan bersama.

Ketiga komponen dalam *Integrative Framework for Collaborative Governance* yaitu *system context*, *driver*, dan *collaborative dynamics* saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Hubungan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis serta memahami tantangan dan potensi yang ada dalam proses kolaborasi. Dengan memahami konteks

sistem, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada kolaborasi. *Driver* yang teridentifikasi membantu memotivasi aktor untuk berpartisipasi, sementara pemahaman mengenai dinamika kolaboratif memungkinkan kita untuk merancang interaksi yang produktif antar aktor.

Selain Teori *Integrative Framework*, terdapat pula Model *collaborative governance* Shergold. Model Tata Kelola Kolaboratif Shergold (dalam O'Flynn & Wanna, 2008:13-21), memperlihatkan tahapan transformatif dalam proses kolaborasi, dari bentuk hubungan yang terpusat hingga yang bersifat kolaboratif penuh. Empat dimensi yang diidentifikasi dalam model ini membantu kita memahami berbagai tingkat interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik.

1. Komando (*Command*)

Kolaborasi pada tahap ini hampir tidak ada, karena aktor lain hanya menjalankan perintah dari otoritas pusat tanpa partisipasi langsung dalam perancangan kebijakan.

2. Koordinasi (*Coordination*)

Pada tahap ini, keterlibatan aktor mulai meningkat, keputusan masih dikendalikan oleh pihak yang berwenang, tetapi dengan pelibatan aktor lain secara kolektif dalam proses pengambilan keputusan.

3. Kerja sama (*Cooperation*)

Dalam fase ini, berbagai aktor mulai berbagi ide, informasi, dan sumber daya dengan tujuan mencapai keuntungan bersama. Tidak ada satu otoritas tunggal yang mengendalikan proses, melainkan adanya pengelolaan bersama dari semua pihak.

4. Kolaborasi (*Collaboration*)

Ini adalah tahap tertinggi dari model tata kelola Shergold (dalam O'Flynn& Wanna, 2008:20), di mana aktor-aktor yang otonom bekerja bersama untuk menciptakan solusi atau kebijakan yang baru.

Proses transformatif yang digambarkan oleh Shergold (dalam O'Flynn& Wanna, 2008:21) menunjukkan bahwa kolaborasi bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari evolusi interaksi yang dimulai dari komando hingga kolaborasi penuh. Identifikasi pendorong seperti kepentingan bersama, tujuan yang jelas, dan kepercayaan antar aktor dapat memotivasi partisipasi lebih lanjut. Memahami dinamika kolaboratif membantu kita merancang pola interaksi yang produktif, di mana partisipasi, tanggung jawab, dan penciptaan nilai bersama semakin meningkat di setiap tahapan. Model ini membantu kita melihat bagaimana proses tata kelola dapat bergeser dari struktur yang kaku dan hierarkis menuju struktur yang lebih inklusif dan kooperatif. Ini pada akhirnya dapat menciptakan kebijakan publik yang lebih responsif, inovatif, dan efektif dalam menjawab tantangan publik.

Kedua teori ini memberikan Gambaran yang cukup kompleks untuk memahami konsep tata kelola kolaborasi atau *collaborative governance*. Selain kedua teori ini, teori *collaborative governance* yang dikemukakan Ansell dan Gash tidak kalah terkenal. Ansell dan Gash (dalam Kurniadi, 2020:57-58), mengemukakan beberapa dimensi utama yang menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Berikut adalah dimensi-dimensi pengukuran yang menjadi fokus dalam teori ini:

1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

Kondisi awal mengacu pada situasi hubungan di antara para pemangku kepentingan sebelum kolaborasi dimulai. Ada tiga elemen kunci yang menjadi indikator dimensi ini yaitu:

a. Distribusi Kekuasaan dan Sumber Daya

Kolaborasi mungkin sulit jika ada ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan antara aktor-aktor yang terlibat. Aspek ini dapat dilihat dari jumlah sumber daya yang dimiliki setiap aktor.

b. Sejarah kolaborasi

Bagian untuk menggambarkan bagaimana awal mula kolaborasi dibangun. Dengan melihat insiden konflik ataupun keberhasilan dalam kolaborasi sebelumnya.

c. Insentif untuk berkolaborasi

Aktor-aktor akan lebih cenderung berkolaborasi jika mereka melihat manfaat yang jelas dari kolaborasi tersebut. Misalnya Jumlah keuntungan bersama yang diidentifikasi, atau perbandingan antara kolaborasi dan keuntungan individual.

2. Fasilitasi Kepemimpinan (*Facilitative Leadership*)

Kepemimpinan yang kuat dan fasilitatif adalah elemen penting dalam *collaborative governance*. Pemimpin yang efektif memainkan peran kunci dalam memfasilitasi dialog, mediasi konflik, dan menjaga semua pemangku kepentingan terlibat dalam proses kolaboratif. Dimensi ini mengukur bagaimana pemimpin berperan dalam:

a. Membangun kepercayaan, dimana kepemimpinan harus bisa membantu membangun kepercayaan di antara aktor-aktor yang berkolaborasi.

b. Memfasilitasi komunikasi, sejauh mana pemimpin bisa memastikan komunikasi yang terbuka dan jujur di antara semua pihak.

3. Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*)

Proses kolaboratif adalah inti dari *collaborative governance* dan terdiri dari berbagai tahapan interaksi yang saling berkaitan. Beberapa elemen kunci dari dimensi ini adalah:

a. Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialogue*)

Dialog yang dilakukan secara langsung penting untuk membangun pemahaman bersama dan memperkuat hubungan antar-pemangku kepentingan. Aspek ini dapat dilihat melalui seberapa sering diadakannya dialog antar aktor dalam kolaborasi.

b. Pembangunan Kepercayaan (*Trust Building*)

Kepercayaan adalah fondasi utama untuk kolaborasi yang sukses. Proses ini biasanya berjalan lambat, dan membutuhkan komitmen waktu serta upaya dari semua pihak yang terlibat. Ini bisa dilihat melalui jumlah pertemuan terbuka yang dilakukan, dan tingkat transparansi informasi yang disampaikan

c. Komitmen bersama (*Commitment to the process*)

Pemangku kepentingan harus memiliki tujuan dan komitmen yang sama terhadap kesuksesan kolaborasi. Tujuan bersama ini biasanya didefinisikan melalui diskusi dan negosiasi di antara pihak-pihak yang terlibat.

d. Pengelolaan Bersama (*Shared Understanding*)

Semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang dihadapi dan solusi yang mungkin. Hal ini memerlukan transparansi dalam berbagi informasi dan data. Aspek ini terlihat dari jumlah kesepakatan bersama dalam Keputusan dan konsistensi pandangan dalam rapat kerja.

4. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Dimensi ini mengukur sejauh mana kolaborasi tersebut didukung oleh desain institusi yang kuat. Kolaborasi yang baik membutuhkan aturan yang jelas, prosedur yang adil, dan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan. Dimensi ini dapat diukur melalui:

a. Aturan Formal dan Informal

Ada aturan formal yang disepakati bersama untuk memfasilitasi proses kolaborasi. Namun, sering kali aturan informal juga mempengaruhi dinamika kolaboratif.

b. Prosedur Pengambilan Keputusan

Prosedur yang terbuka, inklusif, dan transparan diperlukan agar setiap pemangku kepentingan merasa bahwa mereka memiliki peran yang setara dalam pengambilan keputusan.

Kerangka teori yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash digunakan sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena dinilai paling relevan dan komprehensif dalam menganalisis dinamika kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam konteks pengelolaan Geopark Merangin. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi terhadap faktor-faktor kunci seperti kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif sebagai elemen penting dalam keberhasilan tata kelola partisipatif. Hal ini sejalan dengan pandangan Johnson, Hicks, Nan, dan Auer (dalam Plotnikof, 2015:61) yang menyebutkan bahwa model Ansell dan Gash merupakan definisi pertama yang paling lengkap dan kerangka teoritis paling canggih dalam menjelaskan praktik collaborative governance secara konseptual maupun operasional.

2.2. Pembangunan Berkelanjutan

2.2.1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang telah menjadi perhatian utama di berbagai sektor, baik di tingkat global maupun lokal. Konsep ini didefinisikan sebagai proses pembangunan yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga berupaya menjaga kebutuhan generasi mendatang melalui pendekatan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Di

Indonesia, berbagai ahli telah memberikan pandangan dan pemikiran yang memperkaya pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan dalam konteks lokal dan internasional.

Definisi mengenai pembangunan berkelanjutan ini pertama kali dirumuskan dalam laporan "*Our Common Future*" oleh Komisi Brundtland pada tahun 1987. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan (Wibisana, 2017:9). Dalam perspektif lingkungan, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem, mengurangi emisi karbon, dan memastikan penggunaan sumber daya alam yang efisien agar tetap tersedia untuk generasi mendatang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggarisbawahi bahwa pembangunan berkelanjutan harus melibatkan interaksi harmonis antara ketiga aspek tersebut melalui berbagai tujuan seperti tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mencakup pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan. Di Indonesia, pembangunan berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam strategi pembangunan untuk menjamin kualitas hidup yang lebih baik.

Pembangunan berkelanjutan dapat dipahami secara umum sebagai konsep yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Menurut Salim (dalam Rahadian, 2016:48), tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Esensi pembangunan berkelanjutan adalah tercapainya pemerataan pembangunan lintas generasi. Namun, Naibaho dkk. (2021:277) mencatat bahwa tanpa pengawasan dan pengelolaan yang baik, maka tantangan besar dapat muncul dalam

implementasinya. Hal ini dapat menjadi menghambat pencapaian dalam menciptakan keberlanjutan.

Sutamihardja (dalam Rahardian, 2016:48-49) menyatakan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi enam prinsip penting, yaitu:

1. Pembangunan harus menjamin distribusi manfaat secara merata dengan mengutamakan penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui serta menjaga batas pemanfaatan dalam kendali ekosistem.
2. Menjaga kelestarian lingkungan dan pencegahan gangguan ekosistem sangat penting untuk menjamin kualitas hidup generasi masa depan.
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam perlu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk mencapai pemerataan antar generasi.
4. Kesejahteraan masyarakat harus dipertahankan dalam jangka panjang agar dapat dinikmati baik oleh generasi saat ini maupun masa mendatang.
5. Hasil pembangunan harus memiliki manfaat yang bertahan lama dan lintas generasi.
6. Penting untuk menjaga kualitas kehidupan manusia sesuai dengan ekosistem yang mendukungnya, sehingga tercapai keadilan antar generasi.

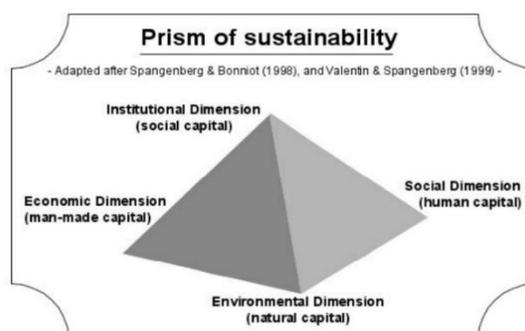
Konsep Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada keberlangsunga lingkungan namun juga pada aspek yang lebih luas. Konsep ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini dan juga memastikan bahwa generasi mendatang tetap memiliki sumber daya yang cukup. Seperti diungkapkan oleh *World Commission on Environment and Development*, tujuan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan mereka (Effendi dkk., 2018:77). Selain itu konsep ini juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara kebijakan, sektor publik, dan masyarakat. Upaya untuk mencapai tujuan ini memerlukan kerja sama

lintas sektoral dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, sehingga manfaat dari pembangunan ini dapat dirasakan oleh semua kalangan, tanpa ada yang tertinggal.

2.2.2. Teori-teori Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah konsep dalam mengelola sumberdaya dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Menurut Pertiwi (2017:11), implementasi pembangunan berkelanjutan tidak akan optimal jika tidak ada tiga modal utama berupa ekonomi, ekologi, dan sosial. Ketiga modal ini harus dipertahankan dan dikembangkan secara seimbang agar dampak positif pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. Pendekatan ini menekankan bahwa keberlanjutan tidak hanya soal keuntungan ekonomi tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan sosial yang sehat dan harmonis.

Keiner (2005:4) mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menambahkan dimensi kelembagaan sebagai elemen penting yang melengkapi tiga dimensi sebelumnya ekonomi, lingkungan, dan sosial. Menurut Keiner, pembangunan berkelanjutan tidak hanya melibatkan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan dan berkelanjutan, tetapi juga membutuhkan perlindungan lingkungan yang mencegah kerusakan ekosistem, pemeliharaan kualitas kehidupan sosial yang tinggi, serta penguatan kelembagaan yang mendukung proses tersebut.



Gambar 1. Prisma Keberlanjutan (Keiner, 2005).

Keiner (2005:4) menggambarkan pendekatan multidimensi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan prisma sebagai metafora untuk menunjukkan hubungan antara dimensi-dimensi inti yang saling terhubung. Melalui Prisma ini, Keiner mengemukakan dimensi keberlanjutan meliputi:

1. Dimensi Ekonomi (*Man-Made Capital*)

Dimensi ini mengacu pada komponen pembangunan ekonomi, yang mencakup kegiatan produksi, konsumsi, serta penciptaan dan distribusi barang dan jasa. *Man-made capital* berfokus pada infrastruktur, teknologi, dan aset buatan manusia yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan memperhatikan kebutuhan keberlanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sambil menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan.

2. Dimensi Sosial (*Human Capital*)

Dimensi ini menekankan pentingnya manusia dalam proses pembangunan berkelanjutan. *Human capital* merujuk pada kemampuan, keterampilan, pengetahuan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari dimensi sosial adalah untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera dengan memberikan akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

3. Dimensi Lingkungan (*Natural Capital*)

Dimensi ini berfokus pada pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati. *Natural capital* menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan meminimalkan dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Dimensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

4. Dimensi Institusional (*Social Capital*)

Dimensi institusional atau modal sosial merujuk pada peran lembaga, organisasi, dan norma-norma sosial dalam memfasilitasi kerjasama, kepercayaan, dan keterlibatan masyarakat. Dimensi ini mencakup kebijakan, peraturan, tata kelola yang baik, serta kolaborasi antar sektor. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada bagaimana lembaga dan struktur sosial berfungsi untuk mendukung keberlanjutan.

Pandangan Keiner (2005:4) menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan pendekatan holistik, di mana ekonomi, lingkungan, sosial, dan kelembagaan bekerja secara sinergis. Tanpa adanya keseimbangan di antara keempat dimensi ini, pembangunan berkelanjutan akan sulit dicapai secara efektif dan adil bagi semua pihak serta generasi mendatang.

Isu Pembangunan berkelanjutan sebagai isu penting juga menjadi perhatian dunia terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui program internasional yang disepakati oleh PBB untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan antara tahun 2000 hingga 2015 dikenal sebagai *Millennium Development Goals* (MDGs). Tujuan ini dirancang untuk mengatasi isu-isu global seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, dengan kerangka waktu yang jelas. Pada tahun 2012, dalam Konferensi Rio+20 di Rio de Janeiro, Brasil, disepakati dokumen penting berjudul *The Future We Want*. Dokumen ini memuat arahan untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, regional, dan nasional, serta merefleksikan pandangan bersama tentang masa depan yang diharapkan (*common vision*) dan komitmen untuk memperbaiki upaya menuju pembangunan berkelanjutan (*renewing political commitment*). *The Future We Want* memperkuat dasar-dasar *Rio Declaration* tahun 1992 dan *Johannesburg Plan of Implementation* tahun 2002, dengan fokus pada tiga isu utama:

1. *Green Economy* dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.
2. *Institutional Framework for Sustainable Development*, yaitu pengembangan kerangka kelembagaan untuk menguatkan peran institusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat global.
3. *Framework for Action and Means of Implementation*, yang meliputi kerangka aksi dan instrumen pendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Kerangka aksi untuk pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pasca-2015, yang dibentuk oleh PBB, meliputi tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan yaitu, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Prinsip yang diterapkan dalam kerangka ini adalah inklusivitas dan transparansi, yang berarti adanya keterbukaan antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyepakati tujuan pembangunan global.

Menurut laporan ICSU (2015), terdapat 17 tujuan utama dalam SDGs yang meliputi:

1. Tanpa Kemiskinan.
2. Tanpa Kelaparan.
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera.
4. Pendidikan Berkualitas.
5. Kesenjangan Gender.
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak.
7. Energi Bersih dan Terjangkau.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur.
10. Berkurangnya Kesenjangan.
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.

13. Penanganan Perubahan Iklim.
14. Ekosistem Lautan.
15. Ekosistem Daratan.
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

SDGs memiliki tiga pilar utama, yaitu keberlanjutan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan tanpa merusak lingkungan atau menciptakan ketimpangan, keberlanjutan sosial yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan yang bertujuan melindungi dan memulihkan ekosistem demi kesejahteraan generasi mendatang. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, diperlukan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, masyarakat, dan individu. Implementasi SDGs menghadapi sejumlah tantangan besar, seperti kebutuhan akan pembiayaan yang memadai, kerja sama antarnegara yang efektif, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan kemajuan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, SDGs diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pembangunan yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan untuk seluruh dunia.

Konsep pembangunan berkelanjutan ini memberikan pemahaman bahwa banyak sekali kerangka dalam memandang Pembangunan berkelanjutan. Selain dua teori ini, terdapat teori yang dikemukakan oleh Kates et al. (2005:8). Pandangan ini memberikan pemahaman mendalam tentang definisi, tantangan, dan pendekatan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan. Kates dan rekan-rekannya mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia sambil melestarikan lingkungan dan sumber daya untuk generasi mendatang.

Konsep ini melibatkan upaya untuk menyeimbangkan tujuan pembangunan sosial-ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial.

Kates et al. (2005:10-11), menjelaskan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai suatu upaya yang mencakup dua aspek utama berupa apa yang harus dilestarikan dan apa yang harus dibangun. Pada bagian yang harus dibangun dan dilestarikan, fokusnya adalah pada dimensi:

1. *Nature* (alam), termasuk bumi, biodiversitas, dan ekosistem.
2. *Life support* (penunjang kehidupan), yang mencakup layanan ekosistem, sumber daya alam, dan lingkungan yang mendukung kehidupan manusia.
3. *Community* (masyarakat), seperti budaya, kelompok sosial, dan wilayah tertentu.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang diuraikan oleh Kates et al. menawarkan pendekatan komprehensif untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia saat ini dan kelestarian sumber daya serta lingkungan bagi generasi mendatang. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dicapai dengan mengabaikan salah satu dari pilar utama tersebut, melainkan harus dikelola secara terintegrasi dan seimbang

Teori Kates et al. dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana penerapan *collaborative governance* berdampak pada keberlanjutan kawasan Geopark Merangin. Dengan menggunakan 3 dimensi utama yang dari Kates et al. (2005:10-11), yaitu:

1. Dimensi *Nature* (Alam), dengan indikatornya:
 - a. Kualitas dan keanekaragaman ekosistem, tingkat keberhasilan *collaborative governance* dalam menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati Geopark Merangin.

- b. Pemantauan kualitas lingkungan, adanya sistem pemantauan dan data kualitas lingkungan (misalnya, kualitas air, tanah, dan udara) yang diterapkan sebagai bagian dari manajemen Geopark.
2. Dimensi *Life Support* (Penunjang Kehidupan)
 - a. Efisiensi dan penggunaan sumber daya alam, Pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam agar tidak terjadi eksploitasi berlebih (misalnya, pengambilan air atau bahan tambang).
 - b. Dukungan terhadap kegiatan pariwisata berkelanjutan, jumlah dan kualitas inisiatif pariwisata yang ramah lingkungan, termasuk kegiatan edukasi bagi pengunjung untuk menjaga kelestarian lingkungan.
 3. Dimensi *Community* (Masyarakat)
 - a. Kesejahteraan ekonomi Masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan yang berhubungan dengan Geopark, seperti pariwisata dan perdagangan produk lokal.
 - b. Pelestarian budaya lokal, keberhasilan dalam menjaga tradisi dan budaya masyarakat setempat yang terkait dengan Geopark, termasuk peningkatan kesadaran akan pentingnya konservasi.
 - c. Kesadaran dan edukasi lingkungan, Jumlah program edukasi dan kegiatan yang diadakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konservasi Geopark.

Teori Kates et al. (2005) dipilih untuk menjawab rumusan masalah kedua karena memberikan pendekatan holistik terhadap keberlanjutan melalui dimensi *nature*, *life support*, dan *community* yang relevan dengan konteks Geopark Merangin. Teori ini menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian alam, dukungan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mendukung pelaksanaan *collaborative governance* yang mencakup partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal. Selain itu, teori ini memungkinkan pengukuran yang konkret melalui indikator yang dapat dioperasionalisasikan sesuai

tantangan konservasi di Geopark Merangin, sehingga memungkinkan pengelolaan yang berkelanjutan dan beradaptasi dengan kondisi lokal.

2.3. Kebijakan Pengembangan Geopark di Indonesia

Geopark atau Taman Bumi, adalah kawasan yang memiliki warisan geologi yang signifikan, mencakup keunikan bentang alam, nilai ilmiah, dan estetika, yang dikelola untuk tujuan pelestarian, pendidikan, dan pariwisata berkelanjutan (UNESCO, 2015:3). Di Indonesia, *Geopark* tidak hanya menonjolkan aspek geologi, tetapi juga keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan warisan budaya (*cultural diversity*), yang menjadi pilar utama pengembangannya (Rahmasari dan Parameswari, 2020:185). Konsep ini diperkenalkan oleh UNESCO melalui program Global Geoparks Network (GGN) untuk mempromosikan pengelolaan terpadu kawasan berbasis geodiversitas.

Menurut data dari Jaringan Geopark Indonesia (2023), konsep Geopark mulai diadopsi di Indonesia pada sekitar tahun 2008. Inisiatif awal pengembangan kawasan berbasis pelestarian geologi dan pembangunan berkelanjutan ini diprakarsai oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. Pada tahap awal, pengembangan difokuskan pada tiga kawasan, yaitu di Bali, Jawa, dan Lombok.

Peran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menjadi sangat signifikan sejak tahun 2012, khususnya melalui Badan Geologi, yang mulai aktif dalam mendukung identifikasi potensi geologi serta pengembangan Geopark sebagai bagian dari strategi pelestarian sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tiga Geopark pertama yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Geopark Nasional pada tahun 2011 adalah:

1. Geopark Nasional Batur (Provinsi Bali).

2. Geopark Nasional Pacitan (Provinsi Jawa Timur).
3. Geopark Nasional Rinjani (Provinsi Nusa Tenggara Barat).

Kemudian, pada tahun 2013, Geopark Nasional Pacitan dikembangkan menjadi Geopark Nasional Gunung Sewu, yang mencakup wilayah tiga kabupaten lintas provinsi: Pacitan (Jawa Timur), Wonogiri (Jawa Tengah), dan Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Perluasan ini menunjukkan pendekatan lintas wilayah dan lintas sektor dalam pengembangan Geopark, serta memperkuat kolaborasi antar-pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan berbasis warisan geologi.

Geopark generasi kedua mulai dikembangkan sebagai hasil kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (melalui Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata) dan Kementerian ESDM (melalui Badan Geologi). Dua kawasan yang ditetapkan sebagai Geopark Nasional dalam periode ini adalah:

1. Geopark Nasional Merangin di Provinsi Jambi (tahun 2013).
2. Geopark Nasional Toba di Provinsi Sumatera Utara (tahun 2014).

Kehadiran *geopark-geopark* ini menandai semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam mendorong konservasi sumber daya geologi, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui pendekatan yang berbasis pada potensi geologi unik Indonesia. Dimana pengembangan *Geopark* di Indonesia dimasa awal ini belum didukung regulasi khusus, mengandalkan kebijakan sektoral yang mendukung pelestarian lingkungan dan pariwisata. Beberapa regulasi yang digunakan diawal pengembangan geopark di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Regulasi ini didukung melalui beberapa regulasi seperti Peraturan Menteri ESDM maupun Perda di Tingkat daerah, Kurangnya regulasi terpadu mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi atau Geopark, yang menjadi tonggak penting dalam pengelolaan geopark di Indonesia. Perpres ini mengatur pembentukan Komite Nasional Geopark Indonesia, penetapan geopark nasional, dan proses pengusulan ke UNESCO, serta menegaskan koordinasi lintas sektor antara kementerian dan pemerintah daerah serta keterlibatan Masyarakat dan aktor non negara dalam pengembangan wisata di Geopark. Perpres ini diterbitkan pada 25 Januari 2019 dan mulai berlaku pada 31 Januari 2019, memberikan kejelasan hukum untuk pengembangan geopark nasional dan internasional.

Penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) telah memberikan kemajuan yang signifikan dalam upaya pengelolaan dan pengembangan Geopark di Indonesia. Sejak diberlakukannya regulasi ini, Indonesia berhasil mencatatkan pencapaian penting, yakni dengan 12 Geopark yang telah diakui sebagai UNESCO Global Geoparks. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam aspek pelestarian, tetapi juga dalam membangun citra positif Indonesia di tingkat global dalam bidang konservasi dan pariwisata berkelanjutan.

Perpres ini memberikan kejelasan arah dan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program serta kebijakan pengembangan Geopark. Kebijakan pengembangan Geopark di Indonesia diarahkan pada tiga tujuan utama:

1. Pelestarian warisan geologi (*geo-conservation*).
2. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat (*geo-education*),

3. Pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan (*geotourism*).

Implementasi Perpres No. 9 Tahun 2019 telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan pariwisata di kawasan Geopark di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya memperkuat aspek konservasi, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis potensi geologi. Salah satu aspek krusial dalam pengembangan Geopark adalah pendekatan kolaboratif. Konsep pengelolaan Geopark di Indonesia sejak awal telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, masyarakat lokal, serta organisasi non-pemerintah (NGO). Kolaborasi ini menjadi landasan penting dalam memastikan pengelolaan Geopark berjalan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Kebutuhan akan kolaborasi semakin mendesak mengingat adanya keterbatasan kewenangan dan anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, kehadiran regulasi formal seperti Perpres No. 9 Tahun 2019 berfungsi sebagai dasar hukum yang memperkuat bentuk-bentuk kolaborasi yang telah terbentuk sebelumnya, sekaligus membuka ruang bagi pembentukan kolaborasi baru secara lebih terstruktur. Sebagaimana ditegaskan oleh Herdinata dan Kohardinata (2019:138), keberhasilan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan seperti Geopark sangat bergantung pada keberadaan kerangka regulasi yang kuat. Regulasi tersebut tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, sehingga proses kolaboratif dapat berjalan secara adil, transparan, dan berkelanjutan.

Meskipun implementasi Perpres No. 9 Tahun 2019 telah membawa dampak positif dalam mendorong pengembangan Geopark di Indonesia, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas kebijakan secara menyeluruh. Salah satu tantangan utama terletak pada aspek kelembagaan dan pendanaan. Penelitian yang

dilakukan oleh Lestari dan Indrayati (2022:108) mengungkapkan bahwa keberhasilan pengembangan Geopark sangat ditentukan oleh kekuatan institusional dan keberlanjutan pendanaan. Temuan mereka menunjukkan bahwa sejumlah Geopark di Indonesia masih sangat bergantung pada dana hibah untuk mendukung operasional sehari-hari. Ketergantungan ini menjadikan program pengembangan tidak memiliki kepastian jangka panjang, sehingga berdampak pada kualitas dan kesinambungan aktivitas di lapangan.

Selain itu, dari sisi kelembagaan, struktur pengelolaan Geopark belum sepenuhnya solid, khususnya dalam hal koordinasi lintas sektor dan antar-pemangku kepentingan. Lemahnya koordinasi menyebabkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan Geopark tidak selalu terimplementasi secara konsisten di semua level, baik pusat maupun daerah, serta di antara para mitra yang terlibat dalam pengelolaan kawasan. Di sisi lain, aspek partisipasi masyarakat juga masih menjadi tantangan krusial. Nugrianti (2025:124) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan dalam tingkat partisipasi masyarakat lokal. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh minimnya edukasi, kurangnya pemahaman mengenai manfaat Geopark, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap lembaga pengelola. Hal ini berdampak pada keterlibatan masyarakat yang seharusnya menjadi bagian penting dari model pengelolaan kolaboratif dalam Geopark.

Secara keseluruhan saat ini kebijakan pengembangan Geopark di Indonesia menunjukkan arah yang progresif, terutama sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 yang memberikan landasan hukum dan arah strategis yang jelas. Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pemerintah, akademisi, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Geopark tidak hanya dikembangkan sebagai kawasan pelestarian warisan geologi, tetapi juga sebagai wahana pendidikan dan pengungkit ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan.

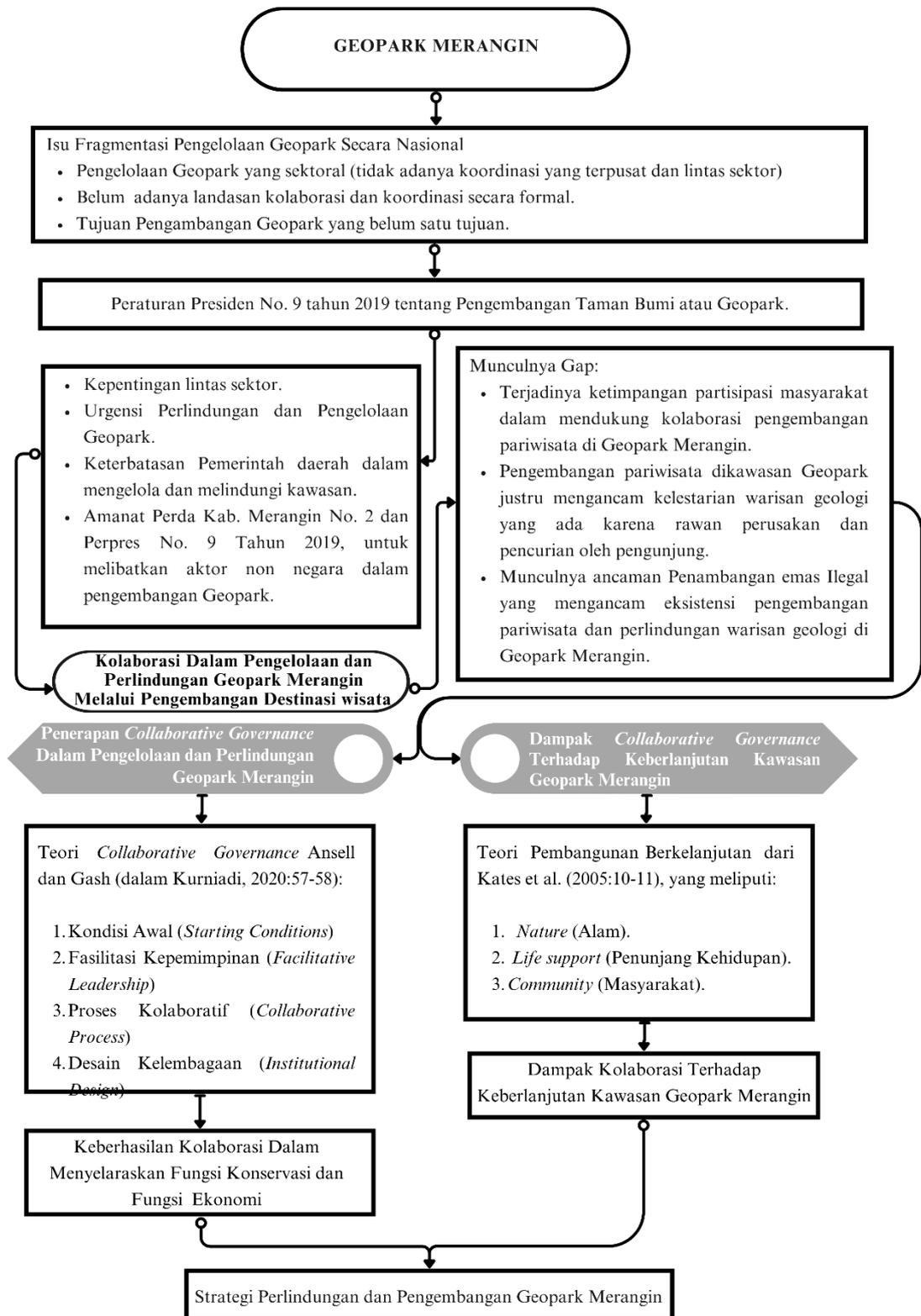
Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Masalah terkait kelembagaan yang lemah, ketergantungan pada pendanaan hibah, serta rendahnya partisipasi masyarakat, menjadi hambatan utama yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan Geopark di berbagai daerah. Kedepannya keberhasilan pengembangan Geopark di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan semua pihak dalam membangun kolaborasi yang sejati, memperkuat tata kelola, serta menjadikan Geopark sebagai bagian integral dari pembangunan wilayah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan komitmen bersama dan sinergi lintas sektor, Geopark berpotensi menjadi model pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menjaga warisan alam, tetapi juga menyejahterakan masyarakat secara inklusif dan berkeadilan.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan bagaimana penerapan model *collaborative governance* dan keberlanjutan dalam pengelolaan serta perlindungan Geopark Merangin. Penelitian ini bertumpu pada teori *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menekankan bahwa efektivitas tata kelola kolaboratif ditentukan oleh empat elemen utama, yaitu: (1) kondisi awal yang meliputi sejarah konflik, ketidaksetaraan kekuasaan, dan tingkat kepercayaan awal antar pemangku kepentingan. (2) kepemimpinan fasilitatif sebagai penggerak dialog dan penjaga keseimbangan kepentingan. (3) proses kolaboratif yang bersifat inklusif, berbasis musyawarah dan orientasi consensus. (4) desain kelembagaan yang memberikan struktur formal dan legitimasi terhadap mekanisme kerja sama lintas sektor. Melalui empat elemen tersebut, diharapkan terwujud kolaborasi yang mampu menyatukan berbagai aktor, seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam satu visi untuk mengelola dan melindungi Geopark Merangin secara berkelanjutan.

Untuk mengeksplorasi sejauh mana keberhasilan kolaborasi tersebut memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan Geopark Merangin, penelitian ini mengacu pada teori pembangunan berkelanjutan oleh Kates et al. (2005). Teori ini mengusulkan tiga dimensi utama yang menjadi indikator keberlanjutan, yaitu: (1) *nature* (alam), yang mencakup perlindungan terhadap kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan integritas ekosistem. (2) *life support* (penunjang kehidupan), yang mencakup pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan untuk mendukung kehidupan Masyarakat. (3) *community* (masyarakat), yang berfokus pada partisipasi masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan. Ketiga dimensi ini sangat relevan dalam konteks Geopark Merangin yang memiliki nilai geologis penting dan sekaligus menjadi tumpuan pembangunan pariwisata serta ekonomi lokal.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini memberikan pijakan analitis untuk memahami keterkaitan antara proses kolaboratif antarpemangku kepentingan dengan pencapaian tujuan konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Geopark Merangin. Penelitian ini mengkaji tidak hanya bagaimana kolaborasi dibentuk dan dijalankan, tetapi juga bagaimana kolaborasi tersebut berdampak terhadap keberlanjutan kawasan dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara holistik.



Gambar 2. Kerangka Pikir.
 Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2024.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena penerapan collaborative governance dalam pengelolaan dan perlindungan Geopark Merangin, serta mengeksplorasi dampaknya terhadap keberlanjutan kawasan. Pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2007:23), merupakan suatu metode penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial serta pengalaman manusia dalam konteks tertentu. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin mengkaji interaksi dan dinamika antar-pemangku kepentingan secara kontekstual, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, akademisi, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif, mengidentifikasi tantangan-tantangan kolaboratif, serta memahami bagaimana setiap aktor berperan dalam proses pengambilan keputusan kolektif dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan Geopark. Penelitian kualitatif juga relevan dalam menganalisis dimensi keberlanjutan kawasan melalui pendekatan Kates et al. (2005), yang meliputi aspek *nature* (alam), *life support* (penunjang kehidupan), dan *community* (masyarakat), yang tidak dapat diukur secara linier namun perlu dipahami melalui interpretasi dan pengalaman para pelaku di lapangan.

Geopark Merangin sebagai objek penelitian memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan beragam aktor dengan kepentingan dan pandangan yang berbeda dalam mengelola warisan geologi, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan

kualitatif dinilai paling tepat untuk menangkap dinamika sosial, proses musyawarah, praktik kolaboratif, serta implikasi kebijakan dalam konteks lokal. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh dan mendalam tentang sejauh mana kolaborasi antar-pemangku kepentingan telah berkontribusi terhadap tujuan perlindungan dan pengembangan kawasan Geopark Merangin secara berkelanjutan.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau wilayah di mana peneliti melaksanakan kegiatan pengumpulan data secara langsung guna memperoleh informasi yang akurat dan relevan terhadap fokus kajian. Moleong (2017:22) menyatakan bahwa pemilihan lokasi penelitian sangat penting karena di sanalah peneliti melakukan pengamatan mendalam terhadap fenomena yang diteliti, berinteraksi dengan informan kunci, serta menggali konteks sosial dan institusional yang melatarbelakangi permasalahan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan fokus utama pada Badan Pengelola Geopark Merangin sebagai pusat aktivitas pengelolaan dan perlindungan kawasan *Geopark*.

Lokasi ini dipilih karena merupakan titik sentral dalam implementasi *collaborative governance* antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, akademisi, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Keberadaan Badan Pengelola memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi, merancang kebijakan, serta memastikan keterpaduan antara fungsi konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dengan memilih lokasi ini, penelitian diharapkan dapat menggali secara mendalam dinamika kolaborasi, tantangan kelembagaan, serta dampak nyata dari penerapan model tata kelola kolaboratif terhadap keberlanjutan kawasan Geopark Merangin.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan di kawasan Geopark Merangin. Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana model tata kelola kolaboratif berdampak terhadap keberlanjutan kawasan ini. Melalui teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008), penelitian ini akan menilai bagaimana penerapan kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan di kawasan Geopark Merangin. Apakah berhasil atau tidak berhasil dalam menyelaraskan antara fungsi ekonomi (Pemberdayaan Masyarakat) dengan Fungsi Konservasi. Ansell dan Gash (dalam Kurniadi, 2020:57-58) dalam teorinya menjelaskan 4 dimensi untuk mengukur keberhasilan sebuah tata kelola kolaborasi, dengan fokusnya antara lain:

1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*) dengan indikator pengukuran:
 - a. Distribusi sumber daya di antara pemangku kepentingan.
 - b. Sejarah kolaborasi dan tingkat kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.
 - c. Insentif untuk berkolaborasi, termasuk potensi keuntungan bersama.
2. Fasilitasi Kepemimpinan (*Facilitative Leadership*) dengan indikator pengukuran:
 - a. Membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan.
 - b. Memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan jujur selama proses kolaboratif.
3. Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*) dengan indikator pengukuran:
 - a. Tingkat kepercayaan yang terbangun selama interaksi kolaboratif.
 - b. Komitmen bersama terhadap tujuan kolaborasi dan pemahaman yang sama tentang masalah yang dihadapi.
4. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*) dengan indikator pengukuran:

- a. Adanya aturan formal dan informal yang mendukung proses kolaboratif.
- b. Prosedur pengambilan keputusan yang inklusif dan transparan di antara pemangku kepentingan.

Selain itu, fokus penelitian ini mencakup dampak keberlanjutan kawasan Geopark Merangin. Melalui tiga dimensi utama dari teori Kates et al. (2005), penelitian ini akan menganalisis apakah kolaborasi dalam perlindungan dan pengelolaan melalui pengemabnagan destinasi wisata di Geopark Merangin berdampak baik atau tidak baik terhadap keberlanjutan kawasan ini. Untuk melihat dampak positif atau negatif dari kolaborasi ini maka dapat dilihat melalui fokus pada:

1. *Nature*, penelitian akan menilai upaya pelestarian alam dan keanekaragaman hayati.
2. *Life Support*, penelitian akan melihat bagaimana pengelolaan sumber daya alam serta optimalisasi potensi yang dimiliki.
3. *Community*, penelitian akan meninjau keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pelestarian dan dampak sosial-ekonomi dari pengelolaan Geopark.

Fokus ini penting untuk memahami berhasil atau tidak berhasil penerapan *collaborative governance* dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan. Selain itu juga untuk melihat dampak yang diberikan terhadap keberlanjutan upaya konservasi, edukasi dan kesejahteraan Masyarakat yang ada di Geopark Merangin.

3.4. Informan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan. Teknik *purposive sampling* melibatkan pemilihan informan atau narasumber dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan tema penelitian, sehingga informan yang dipilih memiliki informasi yang relevan terkait aspek yang sedang diteliti. Dengan pendekatan ini,

peneliti dapat memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki kapasitas dan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti, serta kemampuan untuk memberikan wawasan yang signifikan tentang topik tersebut. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memilih informan yang dianggap memiliki keterlibatan langsung dengan pelaksanaan kebijakan *collaborative governanace* dalam pengelolaan dan perlindungan Geopark merangin. Serta memiliki pengetahuan mendalam tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Beberapa informan yang dipilih oleh penulis antara lain:

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian.

No.	Instansi	Nama	Jabatan	Alasan
1.	BAPPEDA Kabupaten Jambi	Jemmy Riga, S.S.P., M.Si.	Kasubbid. Perencanaan Prasarana Wilayah	Berperan dalam perencanaan pembangunan wilayah, khususnya dalam aspek infrastruktur yang menunjang pengembangan Geopark Merangin. Wawasannya penting dalam memahami bagaimana kebijakan pembangunan daerah diintegrasikan dengan perlindungan dan pemanfaatan kawasan Geopark secara berkelanjutan. Selain itu pandangannya diperlukan untuk melihat keterlibatan BAPPEDA yang merupakan inisiator dalam kolaborasi ini.
2.	Universitas Jambi	Dr. Agus, S.Sos., M.Hum.	General Manager BP Geopark Merangin & Akademisi Universitas Jambi	Sebagai General Manager Badan Pengelola Geopark (BP Geopark) Merangin, beliau memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan, strategi pengelolaan, dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga status Geopark Merangin. Sebagai akademisi, beliau juga dapat memberikan perspektif ilmiah terkait konsep <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan geopark serta keterlibatan

No.	Instansi	Nama	Jabatan	Alasan
				Universitas Jambi dalam kolaborasi ini.
3.	Badan Pengelola Geopark Merangin	Eko Wahyudi	Geolog Lokal Badan Pengelola Geopark Merangin	Memiliki keahlian dalam aspek geologi kawasan Geopark Merangin dan dapat memberikan wawasan terkait nilai ilmiah yang mendukung pengakuan geopark. Pandangannya krusial dalam menilai efektivitas kebijakan pelestarian situs geologi serta dampak aktivitas manusia terhadap keutuhan kawasan Geopark Merangin.
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin	Syafrani, ST., M.Si.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin	Sebagai yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan di Kabupaten Merangin, pandangan beliau dapat memberikan wawasan tentang pengawasan terhadap aktivitas yang dapat merusak ekosistem, seperti PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin), perambahan hutan dll. Informasinya penting dalam memahami kebijakan perlindungan lingkungan di kawasan Geopark serta kendala dalam implementasinya.
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Merangin	Weni Rahmayeni, S.Sos., M.M.	Kabid Seni dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Merangin	Berperan memberikan pandangan tentang pengembangan dan pelestarian budaya lokal yang menjadi bagian dari warisan Geopark Merangin. Wawasannya penting dalam melihat bagaimana aspek budaya dan sejarah diintegrasikan dalam pengelolaan geopark, serta program yang telah dilakukan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai budaya lokal.
6.	Dinas PUPR Kabupaten Merangin	Masyur Efendi, S.T.	Kabid Tata Ruang	Berperan dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan infrastruktur yang menunjang aksesibilitas serta daya tarik wisata di kawasan geopark. Dapat memberikan wawasan

No.	Instansi	Nama	Jabatan	Alasan
				mengenai bagaimana kebijakan tata ruang diselaraskan dengan upaya konservasi lingkungan dan pengembangan ekowisata. Serta melihat keterlibatan Dinas PUPR dalam kolaborasi.
7.	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Merangin	Ismita, S.E.	Pengawas Pariwisata	Memiliki peran dalam pengelolaan sektor pariwisata dan program pemberdayaan masyarakat di Geopark Merangin. Perspektifnya membantu memahami bagaimana kebijakan pariwisata mendukung keterlibatan masyarakat lokal dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata.
8.	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Merangin	Ali Mutahar, S.Pt.	Kabid Koperasi dan UKM	Bertanggung jawab dalam pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UKM, yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar Geopark Merangin. Informasinya penting untuk memahami bagaimana inisiatif ekonomi lokal dikembangkan sebagai bagian dari ekowisata berkelanjutan.
9.	POKDARWIS Dua Sahabat Desa Air Batu	Abdul Gopur	Ketua POKDARWIS Dua Sahabat Desa Air Batu	Sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), ia memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Wawasannya sangat penting dalam memahami peran komunitas lokal dalam pengembangan wisata, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Serta untuk melihat keterlibatan POKDARWIS dalam kolaborasi di kawasan Geopark Merangin.

No.	Instansi	Nama	Jabatan	Alasan
10.	Tokoh Masyarakat di Kawasan Inti Geopark Merangin	Syamsul Huda	Penggiat Wisata di Kawasan Inti Geopark Merangin	Sebagai pelaku wisata dan tokoh masyarakat, ia memiliki pengalaman dalam mendukung ekowisata berbasis komunitas. Perspektifnya penting dalam memahami bagaimana masyarakat melihat dampak Geopark Merangin terhadap ekonomi lokal serta peran mereka dalam pengelolaan kawasan.
11.	Tokoh Masyarakat dikawasan situs Perkampungan Rumah Tuo Rantau Panjang	Iskandar AG	Tokoh Adat Dan Pewaris Ke-17 Situs Rumah Tuo Rantau Panjang	Sebagai tokoh adat, ia memiliki wawasan mendalam tentang nilai budaya dan sejarah yang terkait dengan Rumah Tuo Rantau Panjang, yang merupakan bagian dari Geopark Merangin. Informasinya penting untuk memahami bagaimana tradisi dan nilai budaya lokal dipertahankan dalam era modernisasi serta peran masyarakat adat dalam konservasi budaya.

Sumber: Olahan Peneliti, (2024).

3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa sumber data untuk menjelaskan dan memperkuat analisisnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2016:12), terdapat dua jenis sumber data utama yang digunakan:

3.5.1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan utama yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yang meliputi beberapa pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, Badan Pengelola Geopark Merangin, tokoh masyarakat, kelompok pengelola situs Geopark, dan akademisi. Data yang diperoleh dari wawancara ini memberikan perspektif langsung dan mendalam tentang implementasi kebijakan

collaborative governance dalam pengelolaan dan perlindungan Geopark Merangin.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen resmi, laporan, artikel ilmiah, buku, dan statistik yang relevan. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi dokumen kebijakan pemerintah terkait pengelolaan Geopark, laporan tahunan Badan Pengelola Geopark Merangin, publikasi ilmiah tentang *collaborative governance* dan pengelolaan Geopark, serta data statistik terkait kondisi lingkungan dan sosial ekonomi di kawasan tersebut. Data sekunder ini memberikan kerangka yang lebih luas untuk memahami konteks pengelolaan Geopark dan mendukung analisis yang dilakukan terhadap data primer.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berperan penting dalam memperoleh informasi yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Seperti yang dikemukakan oleh Nasir (dalam Riduwan, 2013:24), teknik ini merupakan instrumen penting dalam memastikan kualitas data yang dihasilkan. Data yang dikumpulkan dapat berbentuk numerik, tulisan, informasi verbal, dan bentuk lain yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data.

3.6.1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) sebagai metode utama. Dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun, metode ini tetap fleksibel dalam menggali informasi dari perspektif dan pengalaman informan. Pendekatan ini memberikan keleluasaan dalam mengembangkan pertanyaan sesuai respons.

Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan dan perlindungan Geopark Merangin.

3.6.2. Observasi

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data langsung mengenai praktik *collaborative governance* dan kondisi keberlanjutan di kawasan Geopark Merangin. Observasi dilakukan dengan cara mengamati interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, akademisi, dan sektor swasta, dalam kegiatan pengelolaan dan pelestarian Geopark. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap kegiatan rapat koordinasi, program konservasi, sosialisasi kebijakan, serta berbagai kegiatan komunitas yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan budaya.

Melalui observasi ini, peneliti juga mengumpulkan data visual dan catatan lapangan mengenai kondisi lingkungan di Geopark Merangin, seperti keberadaan keanekaragaman hayati, kondisi ekosistem, serta infrastruktur pendukung wisata dan konservasi. Selain itu, observasi bertujuan untuk mencatat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Geopark, termasuk partisipasi mereka dalam program-program yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi. Data yang diperoleh dari observasi ini akan digunakan untuk mendukung analisis mengenai sejauh mana penerapan *collaborative governance* berdampak pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya di kawasan Geopark Merangin.

3.6.3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah data tertulis serta materi lain yang relevan dengan penerapan *collaborative governance* dan

keberlanjutan di Geopark Merangin. Sumber dokumentasi mencakup dokumen resmi seperti peraturan daerah, kebijakan, laporan tahunan, serta risalah rapat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data dari laporan penelitian, artikel jurnal, berita, serta publikasi lain yang membahas tentang pengelolaan Geopark Merangin, program konservasi, dan keterlibatan masyarakat lokal.

Dokumentasi ini penting untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang proses pengambilan keputusan, kebijakan pengelolaan, serta hasil dari berbagai program kolaboratif yang telah dilakukan. Melalui metode ini, peneliti dapat menganalisis rekam jejak pelaksanaan *collaborative governance* dan mengidentifikasi tantangan serta keberhasilan yang telah dicapai. Data dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara, sehingga memberikan dasar yang kuat dalam mengukur dampak penerapan *collaborative governance* terhadap keberlanjutan Geopark Merangin, khususnya dalam dimensi lingkungan, ekosistem penunjang kehidupan, dan kesejahteraan sosial budaya masyarakat.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan akan diolah kembali oleh peneliti melalui beberapa tahapan teknik analisis, tahapan ini mencakup:

3.7.1. Editing Data

Pelaksanaan pengeditan data bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam daftar pertanyaan yang telah diisi sejauh mungkin (Cholid & Achmadi, 2016:43). Proses pengeditan ini melibatkan langkah-langkah pengecekan atau klarifikasi terhadap data yang sudah terkumpul, termasuk informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Dalam tahapan ini, peneliti memastikan bahwa setiap

bagian dari data yang terkumpul lengkap, akurat, dan konsisten, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efektif dalam analisis berikutnya. Pengeditan data juga berfungsi untuk mengeliminasi kemungkinan adanya bias atau kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, dengan cara meninjau ulang setiap jawaban dan catatan yang telah diperoleh, serta melakukan penyesuaian atau koreksi yang diperlukan agar data tersebut benar-benar mewakili kondisi yang sebenarnya di lapangan.

3.7.2. Interpretasi Data

Langkah interpretasi data dalam penelitian ini mencakup analisis dan eksplorasi makna dari hasil yang telah diperoleh. Interpretasi bertujuan untuk menjelaskan dan menemukan signifikansi hasil analisis baik secara teoretis maupun praktis dalam konteks penelitian (Silalahi, 2010:12). Setelah data melalui proses pengeditan, penelitian ini akan mengevaluasi data tersebut, kemudian menyajikan penjelasan atau interpretasi yang mendalam. Pada tahap akhir, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian, memberikan gambaran yang jelas tentang temuan, serta implikasi teoritis dan praktis yang relevan dengan topik penelitian. Proses interpretasi ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya akurat, tetapi juga bermakna dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan sejak awal.

3.8. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk memastikan keabsahan data adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan pendekatan yang melibatkan pemanfaatan berbagai sumber data untuk memverifikasi dan memperkuat temuan penelitian. Menurut Denzin dalam (Sugiyono, 2016: 56), triangulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari satu sumber dapat dipastikan kebenarannya dengan mencocokkannya dengan data dari sumber lain.

Dalam konteks penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan kunci, observasi lapangan, dan dokumen atau arsip resmi yang terkait dengan pengelolaan Geopark Merangin. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat konsistensi antara informasi yang disampaikan oleh para informan dan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung serta dokumentasi yang ada. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif dan pengalaman dari informan yang berbeda, sehingga data yang dihasilkan lebih komprehensif dan akurat. Dengan triangulasi sumber, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terpercaya mengenai dinamika pengelolaan Geopark Merangin serta peran modal sosial dalam konteks tersebut.

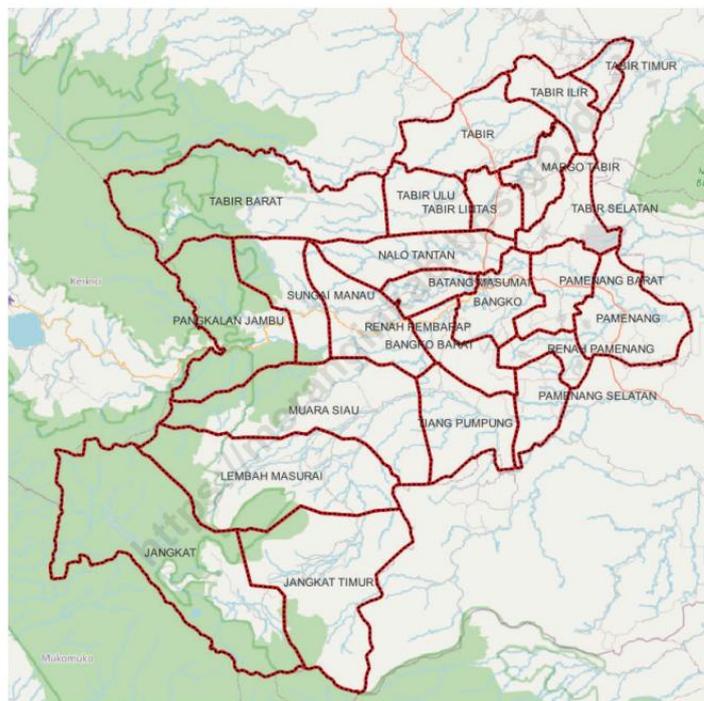
IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Kabupaten Merangin

Kabupaten merangin merupakan 1 dari 11 Kabupaten/Kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jambi. Kabupaten ini memiliki sejarah panjang yang berawal dari pembentukan wilayah administratif di Provinsi Jambi. Pada tahun 1956, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 wilayah ini dikenal sebagai Kabupaten Merangin yang mencakup kewedanan Bangko, Sarolangun, Bungo, dan Tebo, dengan ibu kota di Muaro Bungo. Namun, aktivitas pemerintahan lebih banyak berpusat di Bangko. Pada tahun 1958, akibat konflik PRRI, kantor Bupati Merangin di Bangko dibakar, sehingga pusat pemerintahan sementara dipindahkan ke Muaro Bungo. Kemudian, pada tahun 1965, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965, wilayah ini dimekarkan menjadi Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Tanjung Jabung, dengan ibu kota Kabupaten Sarolangun Bangko ditetapkan di Bangko. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Sarolangun Bangko kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun, dengan ibu kota Kabupaten Merangin tetap di Bangko.

4.1.1. Kondisi Geografi

Kabupaten Merangin terletak di antara $101^{\circ}32'39''$ – $102^{\circ}38'35''$ Bujur Timur dan $1^{\circ}39'23''$ – $2^{\circ}46'9''$ Lintang Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Bungo di sebelah utara, Kabupaten Sarolangun di timur, Kabupaten Lebong di selatan, serta Kabupaten Kerinci di sebelah barat. Secara keseluruhan, luas Kabupaten Merangin mencapai 7.679 km², yang mencakup berbagai kawasan administratif dan geografis. Dengan 24 Kecamatan dan 10 Kelurahan dan 205 Desa.



Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Merangin.
Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka (BPS Merangin, 2024).

Ketinggian wilayah ini berkisar antara 10 hingga 1.206 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan bentang alam yang umumnya bergelombang. Dataran rendah berada pada ketinggian 0–100 mdpl dan mencakup sekitar 42,77% dari total luas kabupaten. Wilayah dataran sedang, dengan ketinggian antara 100–500 mdpl, meliputi sekitar 32,52% dari luas wilayah. Sementara itu, dataran tinggi tersebar di beberapa kecamatan, seperti Jangkat, Sungai Tenang, Pangkalan Jambu, Sungai Manau, Muara Siau, dan Tabir Ulu. Kemiringan lereng di wilayah ini bervariasi, dengan lereng >40% mencakup sekitar 35,93% dari total luas kabupaten.

4.1.2. Kondisi Demografi

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh BPS (2024) jumlah penduduk Kabupaten Merangin pada tahun 2024 mencapai 393.299 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 7.668,61 km², hal ini

menghasilkan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 51 jiwa per km². Tingkat kemiskinan di Kabupaten Merangin menunjukkan tren penurunan. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,40%, mengalami penurunan sebesar 0,50 poin persentase dibandingkan Maret 2023. Secara absolut, jumlah penduduk miskin pada periode tersebut adalah sekitar 33.490 jiwa. Penduduk Kabupaten Merangin mayoritas bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menjadi sumber penghasilan utama. Komoditas unggulan yang dihasilkan meliputi karet, kelapa sawit, kopi, dan padi, di mana karet menjadi komoditas utama yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Selain itu, sebagian penduduk juga bekerja di sektor perdagangan, jasa, dan industri kecil menengah.

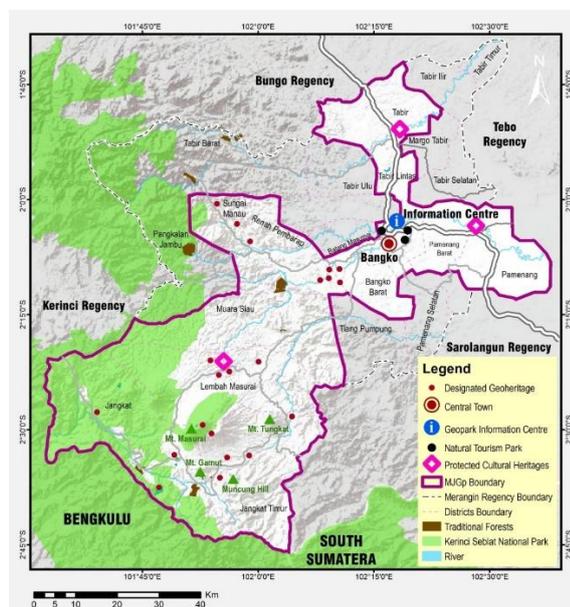
4.2. Geopark Merangin

Taman Bumi Merangin Jambi atau Geopark Merangin adalah kawasan geopark Global UNESCO yang terletak di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Indonesia, dengan luas wilayah mencapai 4.832,31 km². Geopark ini dikenal karena fosil flora unik berusia sekitar 300 juta tahun dari periode Permian Awal, yang merupakan satu-satunya yang tersisa dan terpapar di dunia. Fosil-fosil ini ditemukan di sepanjang Sungai Merangin dan menjadi bukti penting dari fragmen Cathaysia land, termasuk fosil *Araucarioxylon* dan *Agathoxylon*. Selain kekayaan fosilnya, Geopark Merangin juga memiliki keragaman geologis lainnya, seperti bentang alam karst di wilayah Sungai Manau dan kompleks Gunung Masurai yang terbentuk akibat fenomena vulkanik tektonik. Kawasan ini menawarkan berbagai lanskap menarik, termasuk danau, air terjun, dan manifestasi geotermal yang masih aktif hingga saat ini.

Sejak tahun 2013, Geopark Merangin telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional Indonesia. Geopark Merangin Jambi secara resmi diterima sebagai anggota UNESCO Global Geopark berdasarkan hasil Sidang ke-7 UNESCO Global Geoparks Council yang dilaksanakan secara daring. Pengumuman resmi mengenai keanggotaan ini disampaikan dalam sidang Dewan Council

pada Maret 2023 di Paris, Prancis. Selanjutnya, penyerahan piagam keanggotaan berlangsung pada 10 September 2023 di Marrakech, Maroko, dalam Konferensi Internasional UNESCO Global Geopark ke-10. Keanggotaan ini menegaskan pentingnya Geopark Merangin sebagai warisan geologi dunia yang memiliki nilai ilmiah, edukatif, serta potensi pengembangan berkelanjutan.

Kawasan Geopark Merangin sendiri dirancang dengan 3 tujuan utama dalam pengembangannya yaitu Konservasi, edukasi dan ekonomi. Tiga pilar pengembangan ini menjadi arah bagi pengembangan kawasan Geopark Merangin. Selain ini, kawasan ini juga menjadi bagian dari proses Pembangunan berkelanjutan yang ditujukan untuk melestarikan dan melindungi warisan geologi (*Geodiversity*), warisan hayati (*Biodiversity*) dan warisan budaya (*Cultural-diversity*). Sinergi ketiga pilar ini tidak hanya menunjang pengembangan kawasan Geopark berbasis konservasi dan edukasi, tetapi juga mendukung program pembangunan berkelanjutan yang melibatkan peran aktif masyarakat lokal melalui pelatihan dan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya alam dan budaya setempat.



Gambar 4. Peta Kawasan Geopark Merangin.
Sumber: Badan Pengelola Geopark Merangin, (2025).

Kawasan Geopark Merangin mencakup hampir $\frac{3}{4}$ luas keseluruhan dari Kabupaten Merangin. Dari peta di atas digambarkan bahwa wilayah Geopark merangin mencakup berbagai jenis wilayah yang dikuasai baik pemerintah, lahan pribadi hingga lahan konservasi seperti Taman Nasional. Hal ini lah yang menjadikan pengelolaan dan perlindungan kawasan ini menerapkan konsep tata kelola kolaborasi antar aktor dan Lembaga yang terlibat. Selain itu juga turut menuntut peran serta Masyarakat dalam mengelola dan melestarikan kawasan ini. Oleh karena itu pada tahun 2019 terbentuklah Badan Pengelola (BP) Geopark Merangin sebagai wadah mengakomodasi semua pihak terkait dalam pengembangan, perlindungan dan pelestarian kawasan ini.

Geopark Merangin, yang berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola (BP) Geopark Merangin, memiliki visi besar yaitu “*Terwujudnya Kawasan Geopark Merangin berdaya saing global.*” Visi ini mencerminkan komitmen kuat untuk mengembangkan kawasan geopark yang tidak hanya unggul secara lokal, tetapi juga mampu bersaing di tingkat internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, BP Geopark Merangin menetapkan lima misi strategis yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Misi tersebut antara lain:

1. Memperbaiki dan meningkatkan aktivitas konservasi.
2. Meningkatkan pembangunan Geopark Merangin Jambi berbasis paleobotani.
3. Menjadikan Geopark Merangin Jambi sebagai pusat penelitian, pendidikan berskala global.
4. Peningkatan nilai jual produk lokal.
5. Meningkatkan tata kelola kelembagaan *geopark* bestandar internasional.

Geopark Merangin sebagai kawasan yang dibangun dengan salah satu fungsinya yaitu konservasi dan ekonomi melalui pemberdayaan Masyarakat memiliki potensi yang besar. Kawasan ini memiliki beberapa situs yang perlu dilindungi. Diantaranya yaitu terdiri dari 19 situs warisan geologi (*Geodiversity*) yang berstatus lokal hingga internasional. Selain itu juga memiliki warisan budaya dan flora serta fauna yang perlu dilindungi. Sebagai kawasan yang berkonsep berkelanjutan, kawasan ini didesain sebagai pusat

edukasi, konservasi hingga kawasan pemberdayaan Masyarakat. Sebagai daerah pilar pendukung pembangunan berkelanjutan, kawasan geopark Merangin memegang peran strategis bagi terwujudnya Pembangunan yang berkelanjutan.

4.3. Badan Pengelola Geopark Merangin

Badan Pengelola Geopark Merangin (BP Geopark Merangin) merupakan lembaga non-Organisasi Perangkat Daerah (non-OPD) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Merangin. Badan ini dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan pengelolaan dan perlindungan kawasan Geopark Merangin secara komprehensif dan berkelanjutan. Sejak kawasan ini ditetapkan sebagai Geopark Nasional Indonesia pada tahun 2013, keberadaan badan pengelola menjadi sangat penting dalam mengatur, melestarikan, dan mengembangkan potensi geologi, hayati, dan budaya yang ada di kawasan tersebut.

Pembentukan BP Geopark Merangin dilandasi oleh kebutuhan akan tata kelola yang responsif terhadap tantangan pengelolaan kawasan yang kompleks. Struktur organisasi badan ini dirancang secara berlapis (multilayer), yang mencerminkan prinsip partisipasi dan kolaborasi. Dewan Penasihat diisi oleh pejabat tinggi, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, sedangkan Dewan Pengawas dipimpin langsung oleh Bupati Merangin. Dalam pelaksanaan teknis, Dewan Pengelola dan Dewan Ahli memainkan peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program geopark, dengan dukungan dari Sekretariat serta unit pengelola situs yang mencakup aspek geologi, hayati, dan budaya.

Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019, pengembangan Geopark Merangin diarahkan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terutama melalui pengembangan destinasi wisata berbasis pelestarian. Amanat ini dipertegas melalui Permen PPN/Bappenas Nomor 15 Tahun 2020 yang menekankan pentingnya aksi konkret dalam pengembangan geopark yang berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya, keterbatasan kapasitas

pemerintah daerah dalam menjangkau keseluruhan kawasan geopark telah mendorong lahirnya tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) sebagai pendekatan strategis dalam mengelola kawasan ini.

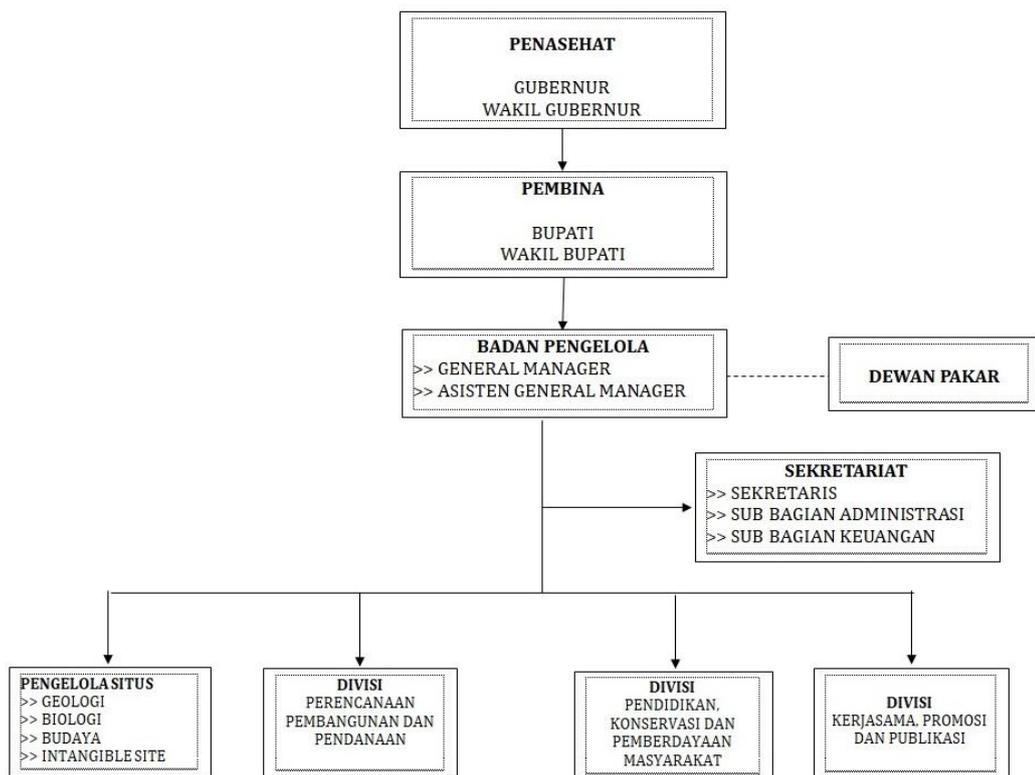
Saat ini, pengelolaan Geopark Merangin dijalankan melalui keterlibatan aktif sepuluh pemangku kepentingan utama. BP Geopark Merangin berfungsi sebagai koordinator utama yang mengintegrasikan kepentingan dan peran seluruh pihak. Melalui kerangka kolaboratif ini, Geopark Merangin diarahkan untuk tidak hanya menjadi kawasan konservasi, tetapi juga pusat edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berstandar internasional. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menjawab tantangan pengelolaan kawasan secara lebih integratif dan berkelanjutan, serta mendorong Geopark Merangin menuju pengakuan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark.

Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 menjadi tonggak penting dalam memperjelas tugas dan fungsi Badan Pengelola Geopark Merangin (BP Geopark Merangin) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan Geopark Merangin. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang menegaskan bahwa pengelolaan kawasan tidak hanya menitikberatkan pada aspek pelestarian warisan geologi, hayati, dan budaya, tetapi juga pada pengembangan kawasan secara berkelanjutan melalui tata kelola yang terstruktur dan kolaboratif.

Penguatan ini kemudian disempurnakan melalui Peraturan Bupati Merangin Nomor 85 Tahun 2019 tentang Badan Pengelola Taman Bumi (*Geopark*) Merangin Jambi, yang memberikan arah operasional yang lebih rinci bagi lembaga pengelola. Peraturan tersebut mengatur mekanisme internal organisasi BP Geopark, termasuk pengaturan masa bakti keanggotaan selama tiga tahun, serta pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala setiap tahunnya. Langkah ini menjadi penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas kerja badan pengelola, terutama dalam mengoordinasikan peran berbagai pemangku kepentingan. Selain itu BP Geopark Merangin memiliki tanggung jawab langsung kepada Gubernur dan Bupati dalam menjalankan tugasnya.

Secara garis besar berdasarkan Pebup ini BP Geopark Merangin memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Membina, mengelola, menyelenggarakan, dan mengembangkan Geopark Merangin Jambi.
2. Melakukan koordinasi, moderasi, sinkronisasi, dan sosialisasi pengembangan destinasi.
3. Menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada dewan pengawas Geopark nasional Merangin Jambi secara berkala dan sewaktu waktu diperlukan.
4. Membangun komunikasi, Kerjasama, dan kemitraan Pembangunan destinasi pariwisata antara Masyarakat, pemerintah, industri pariwisata dan akdemisi, serta pers atau media.



Gambar 5. Struktur Kelembagaan Badan Pengelola Geopark Merangin

Sumber: Badan Pengelola Geopark Merangin (2025).

BP Geopark Merangin memainkan peran sentral dalam menjembatani kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pengelolaan dan pengembangan kawasan Geopark Merangin secara berkelanjutan. Sebagai lembaga yang berperan sebagai eksekutor sekaligus fasilitator, BP Geopark Merangin memastikan bahwa setiap kepentingan yang ada dapat diakomodasi dan diharmonisasikan dalam satu visi bersama. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, komunitas lokal, serta organisasi non-pemerintah, yang bersama-sama berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi berbasis pariwisata. Dengan peran strategisnya, BP Geopark Merangin tidak hanya memastikan keberlanjutan kerja sama lintas sektor, tetapi juga mendorong inovasi dan inisiatif yang memperkuat daya saing kawasan ini sebagai destinasi geopark berskala global. Melalui berbagai program yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara bijak, peningkatan kapasitas masyarakat lokal, serta penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata, BP Geopark Merangin terus berupaya mewujudkan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadikan BP Geopark Merangin sebagai aktor kunci dalam mewujudkan visi Geopark Merangin sebagai destinasi berkelanjutan yang diakui secara nasional maupun internasional.

Sebagai lembaga koordinatif yang memiliki peran strategis dalam pengembangan kawasan Geopark Merangin, Badan Pengelola (BP) Geopark aktif menjalankan dan menginisiasi berbagai program kolaboratif yang bertujuan memperkuat integrasi antara pelestarian lingkungan, pendidikan, serta promosi budaya dan pariwisata. Salah satu program unggulan yang digagas adalah Kampung Pro Iklim dan Geopark Goes to School. Program ini dirancang sebagai upaya edukatif untuk meningkatkan kesadaran pelajar dan masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Melalui pendekatan partisipatif, BP Geopark mendorong generasi muda agar lebih peduli terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan warisan geologi yang dimiliki kawasan Merangin.

Selain fokus pada pendidikan lingkungan, BP Geopark juga memainkan peran penting dalam mempromosikan potensi pariwisata dan kekayaan budaya lokal.

Partisipasi aktif dalam berbagai forum Geopark di tingkat nasional maupun internasional menjadi sarana strategis dalam memperkenalkan Geopark Merangin sebagai destinasi wisata berkelanjutan yang kaya akan nilai ilmiah, budaya, dan estetika. Tidak hanya itu, BP Geopark turut serta mendukung pelestarian tradisi dan kearifan lokal melalui kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan budaya, seperti acara Silek Penyudon dan Bantai Adat, yang memiliki nilai simbolik dan historis penting bagi masyarakat setempat. Peran aktif BP Geopark ini mencerminkan komitmen dalam memperkuat dimensi keberlanjutan kawasan, baik dari aspek ekologis, sosial, maupun budaya secara terpadu.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pendekatan *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008), penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam pengelolaan dan perlindungan Geopark Merangin telah menunjukkan sebuah tata kelola kolaborasi yang berhasil, meskipun belum sepenuhnya ideal. Dimensi kondisi awal memperlihatkan adanya ketimpangan kekuasaan dan keterbatasan kapasitas di pihak non-pemerintah, yang justru mendorong kebutuhan akan kolaborasi. Peran kepemimpinan fasilitatif yang dijalankan oleh BP Geopark cukup efektif dalam membangun komunikasi dan kepercayaan antar aktor. Proses kolaboratif yang ditunjukkan melalui forum diskusi, pelatihan, dan inisiatif lintas sektor telah menciptakan ruang partisipasi yang inklusif, meskipun belum seluruhnya merata secara spasial dan kelembagaan. Tantangan utama yang dihadapi ada pada dimensi desain kelembagaan, walaupun kelembagaan resmi berupa Badan Pengelola Geopark Merangin (BP Geopark) telah ada. Kelembagaan ini belum sepenuhnya ideal karena masih lemah dalam hal struktur pendanaan, maupun kepengurusan, serta belum adanya regulasi formal yang memadai untuk mendukung perlindungan kawasan. Ketiadaan aturan yang kuat ini menjadi kendala dalam merespons permasalahan serius seperti maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), yang berpotensi merusak situs geologi bernilai tinggi dan mencederai semangat konservasi. Untuk itu perlu adanya regulasi dan sanksi yang jelas, terutama untuk mendukung upaya konservasi di kawasan Geopark Merangin.

Hasil analisis berdasarkan teori Pembangunan Berkelanjutan dari Kates et al. (2005) menunjukkan bahwa penerapan kolaborasi dalam pengembangan

wisata telah memberikan kontribusi baik terhadap keberlanjutan kawasan Geopark Merangin. Pada dimensi alam (*nature*), kolaborasi mendorong upaya konservasi dan pengawasan, walaupun belum mampu mengatasi persoalan mendasar seperti PETI dan kerusakan lingkungan di beberapa titik wisata. Pada dimensi penunjang kehidupan (*life support*), kolaborasi mendukung penguatan kapasitas lokal, pengelolaan energi baru terbarukan, serta pembangunan ekonomi berbasis wisata. Sedangkan pada dimensi masyarakat (*community*), program-program pemberdayaan, edukasi, dan penguatan UMKM telah berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kekurangan struktural, pendekatan kolaboratif yang dijalankan telah membawa dampak positif terhadap dimensi keberlanjutan kawasan, dan dapat menjadi dasar penguatan tata kelola geopark di masa mendatang.

6.2. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan:

1. Saran Akademis

a. Analisis Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Geopark

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan aturan formal telah mendukung pengelolaan geopark, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan lingkungan seperti PETI dan degradasi lingkungan. Studi akademis lebih lanjut dapat mengeksplorasi peran hukum adat, seperti konsep Lubuk Larangan, dalam pengelolaan geopark yang berbasis kearifan lokal.

b. Studi tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Geopark.

Penelitian lebih lanjut perlu mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait geopark. Kajian ini dapat mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, termasuk aspek budaya, ekonomi, dan politik lokal.

c. Studi Kelembagaan BP Geopark Merangin

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BP Geopark Merangin masih didominasi oleh PNS dan pegawai paruh waktu, yang berpotensi menghambat fleksibilitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademis mengenai restrukturisasi kelembagaan yang lebih ideal, dengan melibatkan akademisi, komunitas lokal, dan praktisi ekowisata secara lebih proporsional.

2. Saran Praktis

a. Penguatan Kapasitas Aktor Lokal dan Dukungan Keuangan Berkelanjutan

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan kapasitas Pokdarwis, pelaku UMKM, dan komunitas adat dalam hal pemasaran digital, pengelolaan destinasi, serta pelestarian budaya. Selain itu, model pembiayaan kolaboratif dengan mitra swasta dan lembaga donor perlu dirancang agar tidak bergantung pada dana hibah semata.

b. Restrukturisasi Kelembagaan Badan Pengelola Geopark

Perlu adanya evaluasi ulang terhadap struktur kelembagaan Geopark Merangin agar lebih profesional dan independen. Pengurangan dominasi ASN dalam manajemen geopark dapat diganti dengan sistem pengelolaan profesional berbasis meritokrasi yang menjamin akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan program kolaboratif.

c. Pengembangan Program Edukasi Lingkungan dan Budaya yang Berkelanjutan

Implementasi program seperti *Geopark Goes to School* dan Kampung Iklim perlu diperluas jangkauannya dengan melibatkan lebih banyak desa dan sekolah, serta memperkaya materi edukasi berbasis kearifan lokal. Edukasi ini akan berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan warisan budaya.

d. Integrasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Geopark

Praktik konservasi berbasis adat, seperti Lubuk Larangan, harus diakomodasi dalam kebijakan pengelolaan geopark. Pengakuan formal terhadap praktik ini dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi masyarakat dalam melestarikan ekosistem mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A., Putri, K. A. J. A., & Firjanah, L. (2024). Pentingnya Membangun Kesadaran Lingkungan Melalui Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar Guna Membentuk Karakter Peduli Lingkungan pada Siswa. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 11-11.
- Amelia, N. S., & Priambodo, B. (2024). Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Surabaya Melalui Prespektif Collaborative Governance. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 330-344.
- Angela, V. F. (2023). Strategi Pengembangan Ekowisata dalam Mendukung Konservasi Alam Danau Tahai. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 984-993.
- Ansell, C., Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administrasi Research and Theory*. Volume 18. No. 4. Page 543-571.
- Apriliani, A., Rahmawati, R., & Azahari, R. (2018). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan wisata Geopark Ciletuh-Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. *Administratie Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Arismayanti, N. K. (2015). Pariwisata hijau sebagai alternatif pengembangan desa wisata di Indonesia. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 15(1), 1-15.
- Artha, A. D., & Nurasa, H. (2023). Kolaborasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat peluang dan inovasi kebijakan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 7(1), 25-36.
- Berliandaldo, M., & Fasa, A. W. H. (2022). Pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi: Perspektif *collaborative governance* . *Inovasi*, 19(1), 79-97.
- Burhanuddin (2016). Integrasi ekonomi dan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Cendrasari, K., & Subowo, A. (2016). Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (Phbm) di Kesatuan Pemangkuan Hutan

- (KPH) Semarang (Studi Di Lmdh Sumber Rejeki). *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 51-64.
- Cholid, C., & Achmadi, A. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition, Second edition*. London: SAGE Publications.
- Darmayanti, P. W., Hidayana, F. F., Putri, A. S. A. S., & Wijayasa, I. W. (2021). Partisipasi masyarakat sebagai faktor utama dalam pengembangan desa wisata Kaba-kaba. *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata*, 1(2), 45-56.
- Dayanti, R. (2023). *Analisis Kualitas Air Sungai Batang Merangin Akibat Kegiatan Pertambangan Galian C Di Desa Keroya Kabupaten Merangin* (Skripsi, Universitas Jambi).
- Dinata, I. P., & Mussadun, M. (2015). Pengaruh pengembangan kawasan wisata Geopark Merangin terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Air Batu. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 11(3), 328-339.
- Dwisari, V., Sudarti, S., & Yushardi, Y. (2023). Pemanfaatan energi matahari: masa depan energi terbarukan. *OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika*, 7(2), 376-384.
- Eder, F. W., & Patzak, M. (2004). Geoparks-geological attractions: a tool for public education, recreation and sustainable economic development. *Episodes Journal of International Geoscience*, 27(3), 162-164.
- Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. (2018). Pemahaman tentang lingkungan berkelanjutan. *Modul*, 18(2), 75-82.
- Fajariyah, F. N., & Haris, R. A. (2025, February). Partisipasi dalam Kelembagaan Kolaborasi Pengelolaan Wisata Pantai Lombang di Kabupaten Sumenep. *In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 2, No. 1, pp. 78-86).
- Fatmawati, I. (2022). Komunikasi Organisasi Dalam Hubungannya Dengan Kepemimpinan Dan Perilaku Kerja Organisasi. *Revorma: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 2(1), 39-55.
- Febrian, R. A. (2015). *Collaborative governance* dalam/m Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 1(2), 200-208.

- Herdinata, C., & Kohardinata, C. (2019). Pengaruh Regulasi Dan Kolaborasi Terhadap Literasi Keuangan Dalam Upaya Penerapan Financial Technology Pada Usaha Kecil Dan Menengah. *Business and Finance Journal*, 4(2), 135-140.
- Hidayat, A., & Husni, V. (2022). Peran Geopark Rinjani Lombok Sebagai Pilar Pariwisata Berkelanjutan Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 581-596.
- ICSU, ISSC (2015): Review of the Sustainable Development Goals: The Science Perspective. *Paris: International Council for Science (ICSU)*.
- Iriyanti, G., Inggrit, D., Nurhidayat, A., & Utama, H. W. (2020). Karakteristik Kuarsa Batupasir Mentulu Dan Kesebandingannya Terhadap Metapelit Mengkarang: Pendekatan Untuk Memahami Evolusi Tektonik Karbon-Permian. *JTK (Jurnal Teknik Kebumihan)*, 5(2), 24-28.
- Jufrida, J., Basuki, F. R., & Rahma, S. (2018). Potensi Kearifan Lokal Geopark Merangin Sebagai Sumber Belajar Sains Di SMP. *Edufisika: Jurnal Pendidikan Fisika*, 3(01), 1-16.
- Keiner, M. (2005). *History, definition (s) and models of sustainable development*. ETH Zurich.
- Kholis, M. N. (2020). Kearifan Lokal Menuju Sdgs' 14: Studi Kasus Lubuk Larangan Tepian Napal Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 4(2), 169-182.
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68-84.
- Kristianingsih, Yuli. "Bahaya Merkuri Pada Masyarakat Dipertambangan Emas Skala Kecil (Pesk) Lebaksitu." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 10.1 (2018): 32-38.
- Kurniadi, (2020), *Collaborative Governance dalam Penyediaan Infrastruktur*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Lestari, F., & Indrayati, I. (2022). Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Geopark di Indonesia: Tantangan dan Strategi. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 6(2), 102-122.
- Lestari, F., & Indrayati, I. (2022). Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Geopark di Indonesia: Tantangan dan Strategi. *Journal*

of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan), 6(2), 102-122.

Maysarah, N., & Wahyudi, R. *Collaborative governance* In Drug Prevention Between The National Narcotics Agency Of Pekanbaru City And The Pekanbaru Class Ii Special Children's Development Institution. *Jurnal El-Riyasah*, 14(2), 134-147.

Millenio, G. A. A., Solikatun, S., & Evendi, A. (2024, June). Modal Sosial Dalam Pengembangan Entrepreneurship PMI Purna: Studi Di Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. In *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi* (Vol. 2, No. 1, pp. 151-178).

Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan XXIX*. Bandung: PT. Remaja, Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif, cetakan ke-36*.

Muhajir, M., Sumardjono, M. S., Manurung, T., & Ferdinand, J. (2019). Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2-2), 1-13.

Mukhlis, M., Utang, S., Alamsah, D. N., Sri, K. D., & Budiman, R. (2018). Collaboration versus coordination: a dilemma about state actors' position in a policy. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 80(8), 113-119.

Munawar, R. (2023). Pengelolaan Geopark Untuk Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus di Geopark Ciletuh-Palabuhanratu). *Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi*, 21(1), 865-873.

Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: Bildung.

Nugrianti, K. (2025). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Pengembangan Kawasan Geopark. *Jurnal Supremasi*, 121-134.

Nurhasanah, N. (2024). Analisis Perubahan Tutupan Lahan Dan Pengaruh Terhadap Suhu Permukaan Di Das Merangin Tembesi (*Doctoral dissertation, Universitas Jambi*).

O'Flynn, J., & Wanna, J. (2008). *Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia?* (p. 201). Anu Press.

Pertiwi, N. (2017). *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Prasetio, A. D., Syahputra, R., Kristyanto, T. H. W., Tempessy, A. S., & Rokhmatuloh, R. (2017, July). Geological history of Mengkarang formation for enhancing the geodiversity of Merangin Geopark. *In AIP Conference Proceedings* (Vol. 1862, No. 1). AIP Publishing.
- Pratikto, A. G., Subowo, A., & Afrizal, T. (2022). Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata Geopark Silokek (Studi Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat). *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2), 193-210.
- Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. *In Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 3, No. 1, pp. 46-56).
- Raharjo, S. T., Apsari, N. C., Santoso, M. B., Wibhawa, B., & Humaedi, S. (2018). Ekowisata Berbasis Masyarakat (EBM): Menggagas Desa Wisata di Kawasan Geopark Ciletuh-Sukabumi. *Share: Social Work Journal*, 8(2), 158-169.
- Rahman, L. L. A., Perwita, A. A. B., & Rishdianto, A. (2024). Strategi Diplomasi Pertahanan Maritim Dalam Mengatasi Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Perairan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1-7.
- Rahmasari, I., & Parameswari, P. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia untuk Memperoleh Pengakuan UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark: Studi Kasus: Kawasan Gunung Rinjani 2013-2018. *Balcony*, 4(2), 183-194.
- Rakib, M. (2017). Strategi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal sebagai penunjang daya tarik wisata. *Jurnal Kepariwisata*, 1(2), 54-69.
- Reforma, A. D., Purwani, O., & Iswati, T. Y. (2020). Identifikasi Potensi Pariwisata Pracimantoro: Dari Geopark Hingga Kebudayaan Daerah. *ARSITEKTURA*, 18(2), 361-370.
- Repindowaty, R. (2014). Perlindungan hukum terhadap Geopark Merangin Jambi yang berpotensi menjadi anggota global Geopark network (GGN) UNESCO. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Riduwan. (2013). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Sazeta, M. (2022). Analisis Stakeholder dalam Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin. *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, 2(1), 1-22.
- Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(1), 35-50.
- Sianturi, L. T., Dwitasari, P., & Agustin, S. A. (2023). Perancangan Brand Identity Wisata Terintegrasi Dieng Plateau Geopark. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 11(4), F148-F154.
- Silalahi, U. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Situmorang, M., & Suryawan, I. B. (2017). Tinjauan potensi agrowisata di kawasan Bedugul. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(1), 160-169.
- Soedjito, L. R. H. B. (2020). *Geopark: Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sultan, M. (2022). Kolaborasi Stakeholder's Dalam Penyelenggaraan Corporate University Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Widya Swara Indonesia*, 3(2), 81-94.
- Toyib, H., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Kolaborasi Sumber Daya Manusia Dalam Pencapaian Target dan Sasaran Kinerja LKPI Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4), 1508-1516.
- Utami, Y. P. (2021). Implementasi program pemberian beasiswa daerah untuk mahasiswa Kabupaten Lamandau. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 10(1), 1-12.
- Utomo, W., Rusfian, E. Z., & Huseini, M. (2024, July). *Collaborative governance Model Belitung Unesco Global Geopark*. In *Seminar Nasional Inovasi Vokasi* (Vol. 3, pp. 735-744).
- Wibisana, A. G. (2017). Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi: Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 9-19.

- Wibowo, Y. G., Zahar, W., Syarifuddin, H., Asyifah, S., & Ananda, R. (2019). Pengembangan Eco-Geotourism Geopark Merangin Jambi. *Indonesian Journal of Environmental Education and Management*, 4(1), 23-43.
- Yanova, S., Putra, T. S., & Andriani, S. (2023). *Tingkat Pencemaran Logam Berat Merkuri dan Timbal pada Air Sungai Batang Masumai Desa Nibung Kabupaten Merangin Berdasarkan Indeks Contamination/Pollution (C/P)* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Yasah, A. D., Ajuj, S. S., Fardani, L. K. A., & Ikaningtyas, M. (2024). Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis Berkelanjutan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(4).
- Yuliaty, C., & Priyatna, F. N. (2014). Lubuk larangan: dinamika pengetahuan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 9(1), 115-125.
- Zahra, H., Santoso, S., & Kurniawan, I. A. (2024). Penerapan sistem informasi Pelayanan Publik Pada Aplikasi SIMPEL TKR PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(1), 87-98.
- Zouros, N. (2004). The European Geoparks Network-Geological heritage protection and local development. *Episodes Journal of International Geoscience*, 27(3), 165-171.

Dokumen

- Laporan Hasil Kegiatan Badan Pengelola Geopark Merangin Jambi tahun 2023.
- Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin tahun 2023.
- Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Merangin Tahun 2023.
- Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2023.

Peraturan Bupati Merangin Nomor 85 Badan Pengelola Taman Bumi (Geopark) Merangin Jambi.

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi

Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark).

SK Kepala Badan Geologi Nomor 130.K/04/BGL/2012 tentang Penetapan Taman Bumi Merangin Jambi.

Website

CNN Indonesia. 2023. "Panen Energi Air Rantau Kermas Efek Baik Hati pada Hutan". Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230908162441-199-996607/panen-energi-air-rantau-kermas-efek-baik-hati-pada-hutan/2> . Diakses 18 April 2025 Pukul 08.20 WIB.

Goodstats, 2024. Berapa Luas Hutan Di Indonesia. Sumber: <https://goodstats.id/article/berapa-luas-hutan-di-indonesia-pada-2024-5p8qr> diakses pada 14 Oktober 2024 pukul 08.15 WIB.
<https://rainforestjournalismfund.org/id/stories/peti-di-hutan-adat-kami>

Indonesian Geopark Network, 2023. Menapak Sejarah Pembentukan Jaringan Geopark Indonesia. Sumber: <https://www.Geoparksnetwork.id/about-Geopark?q=Geopark> diakses pada 14 Oktober 2024 pukul 10.22 WIB.

Kemenparekraf, 2024. 10 UNESCO Global Geopark Indonesia yang Mendunia. Sumber: <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/10-unesco-global-Geopark-indonesia-yang-mendunia> diakses pada 14 Oktober 2024 pukul 09.11 WIB.

KLHK, 2023. Menteri LHK: Tata Batas Kawasan Hutan Selesai Tahun Ini!

Komala, I. 2021. Ekowisata dan Pohon Asuh di Hutan Adat Depati Karo Jaya Tuo. Sumber: <https://www.pinktravelogue.com/2021/08/hutan->

[adat-depati-karo-jaya-tuo.html#:~:text=Hutan%20Adat%20Depati%20Karo%20Jaya%20Tuo%20memiliki%20luas%20130%20hektar,keberadaan%20pengelolaannya%20berdasarkan%20hukum%20adat](#) diakses pada 18 April 2025 Pukul 08.22 WIB.

Kumparan, 2018. Betambah 8 Lokasi, Kini Indonesia Punya 15 Geopark Nasional. Sumber: <https://kumparan.com/kumparansains/bertambah-8-lokasi-kini-indonesia-punya-15-Geopark-nasional1543575362974241419> diakses pada 14 Oktober 2024 pukul 09.20 WIB.

Tempo, 2023. Taman Bumi Merangin ditetapkan UNESCO sebagai Global Geopark. Sumber: <https://tekno.tempo.co/read/1730925/taman-bumi-merangin-ditetapkan-unesco-sebagai-global-Geopark-ini-profilnya> diakses pada 14 Oktober 2024 pukul 10.02 WIB.

UNESCO, 2023. *Merangin Jambi UNESCO Global Geopark*. Sumber: <https://www.unesco.org/en/igpp/Geoparks/merangin-jambi> diakses pada 14 Oktober 2024 pukul 09.51 WIB.

Universitas Jambi. 2023. Tangan Dingin Tim Teknik Geologi FST UNJA, Jadikan Geopark Merangin sebagai UNESCO Global Geopark. Sumber: <https://www.unja.ac.id/tangan-dingin-tim-teknik-geologi-fst-unja-jadikan-geopark-merangin-sebagai-unesco-global-geopark/>. Diakses 18 April 2025 Pukul 08.28 WIB.